

**ANALISIS PEMAHAMAN SISWA TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN
SEBAGAI WARGA NEGARA INDONESIA
DI SMP NEGERI 5 KOTA SORONG**

SKRIPSI

**Sebagai Persyaratan Untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**



Di Susun Oleh;

NAMA : MUSA RAYAR

NIM : 148720522035

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS PENDIDIKAN BAHASA, SOSIAL DAN OLAAHRAGA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH (UNIMUDA) SORONG**

2026

HALAMAN JUDUL

ANALISIS PEMAHAMAN SISWA TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN

SEBAGAI WARGA NEGARA INDONESIA

DI SMP NEGERI 5 KOTA SORONG

Proposal

Diajukan Untuk memperoleh derajat sarjana pada
Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong

Dipertahankan dalam ujian Proposal

Pada tanggal....

Oleh ;

Musa Rayar

Lahir Rutum, 16 Oktober 2002

HALAMAN PERSETUJUAN
ANALISIS PEMAHAMAN SISWA TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN
SEBAGAI WARGA NEGARA INDONESIA
DI SMP NEGERI 5 KOTA SORONG

NAMA : MUSA RAYAR

NIM : 148720522035

Telah di Setujui Oleh Tim Pembimbing

Pada :

Pembimbing 1

ALDILLA YULIA WIELYS SUTIKNO, M.H.

NIDN : 1404039201



Pembimbing 2

ERNAWATI SIMATUPANG, M.Pd.

NIDN : 1409099601

An.



(.....)

HALAMAN PENGESAHAN
ANALISIS PEMAHAMAN SISWA TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN
SEBAGAI WARGA NEGARA INDONESIA
DI SMP NEGERI 5 KOTA SORONG

NAMA : MUSA RAYAR

NIM : 148720522035

Skripsi Ini Telah Disahkan Oleh Dekan Fakultas Pendidikan Bahasa, Sosial
Dan Olahraga (Fabio) Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Pada : 15 Juni 2026

Dekan



Dr. Roni Andri Pramita, M.Pd.

NIDN. 1411129001

Ketua Penguji

Dr. Ihsan, S.Pd., M.Pd.

NIDN. 1419108901

(.....)

Penguji I

Lestari, M.Pd.

NIDN. 1402118401

(.....)

Penguji II

Ernawati Simatupang, M.Pd.

NIDN. 1409099601

(.....)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Sorong, 11 Juni 2026

Yang membuat pernyataan,

MUSA RAYAR

NIM. 148720522035

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Karena itu aku berkata kepadamu: Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan kuberikan kepadamu.

MARKUS 11, AYAT 24

Apapun pekerjaanmu, belajarlah untuk mencintainya niscaya akan terasa mudah

PERSEMBAHAN

1. Kedua orang tua tercinta yang selalu memberikan kasih sayang, doa, dukungan, dan pengorbanan yang tiada henti demi keberhasilan saya.
2. Keluarga besar yang selalu memberikan semangat, motivasi, dan bantuan selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
3. Semua dosen pengajar Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong Khususnya Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat hingga tersusunnya karya ini.
4. Sahabat dan teman-teman seperjuangan Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang selalu memberikan dukungan dan semangat.
5. Almamater Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong yang telah menjadi tempat saya menimba ilmu dan mengembangkan kemampuan akademik..

ABSTRAK

Musa Rayar. 148720522035. Analisis Pemahaman Siswa Tentang Hak dan Kewajiban Sebagai Warga Negara Indonesia di SMP Negeri 5 Kota Sorong. Skripsi. Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Pendidikan Bahasa, Sosial dan Olahraga, Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong. Juni 2026. Pembimbing (Aldilla Yulia Wielys Sutikno, M.H dan Ernawati Simatupang, M.Pd.)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman siswa SMP Negeri 5 Kota Sorong tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia serta faktor-faktor yang memengaruhi pemahaman tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Subjek penelitian terdiri atas kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), serta siswa kelas VII, VIII, dan IX SMP Negeri 5 Kota Sorong. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman siswa mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara masih berada pada tingkat pemahaman teoritis dan belum sepenuhnya terinternalisasi dalam perilaku sehari-hari. Sebagian siswa telah memahami hak memperoleh pendidikan, kebebasan berpendapat, dan kewajiban menaati peraturan sekolah, namun implementasinya masih belum optimal. Faktor-faktor yang memengaruhi pemahaman siswa meliputi faktor internal seperti kesadaran diri dan motivasi belajar, serta faktor eksternal seperti lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, metode pembelajaran guru, dan pengaruh teman sebaya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembelajaran PPKn perlu dikembangkan secara kontekstual dan berbasis pembentukan karakter agar siswa tidak hanya memahami konsep hak dan kewajiban secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Kata Kunci: pemahaman siswa, hak dan kewajiban, warga negara, PPKn

ABSTRACT

Musa Rayar. 148720522035. Analysis of Students' Understanding of Rights and Obligations as Indonesian Citizens at SMP Negeri 5 Sorong City. Thesis. Pancasila and Citizenship Education Study Program, Faculty of Language, Social and Sports Education, Muhammadiyah University of Education (UNIMUDA) Sorong. June 2026. Supervisors (Aldilla Yulia Wielys Sutikno, M.H and Ernawati Simatupang, M.Pd.)

This study aims to analyze students' understanding of their rights and obligations as Indonesian citizens at SMP Negeri 5 Sorong City and the factors influencing this understanding. The study employed a descriptive qualitative approach with a phenomenological approach. Subjects included the principal, Pancasila and Citizenship Education (PPKn) teachers, and seventh, eighth, and ninth grade students at SMP Negeri 5 Sorong City. Data collection techniques included observation, in-depth interviews, and documentation. Data analysis involved data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results indicate that students' understanding of their rights and obligations as citizens remains at a theoretical level and has not been fully internalized in their daily behavior. Some students understand the right to education, freedom of expression, and the obligation to obey school regulations, but their implementation is still suboptimal. Factors influencing student understanding include internal factors such as self-awareness and learning motivation, as well as external factors such as family environment, school environment, teacher teaching methods, and peer influence. This study concludes that PPKn learning needs to be developed contextually and based on character building so that students not only understand the concept of rights and obligations theoretically, but are also able to apply them in everyday life.

Keywords : pemahaman siswa, hak dan kewajiban, warga negara, PPKn

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan penyertaanNya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian dengan judul “ANALISIS PEMAHAMAN SISWA TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN SEBAGAI WARGA NEGARA INDONESIA DI SMP NEGERI 5 KOTA SORONG” dan penulisan ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Studi pada Fakultas Pendidikan Bahasa, Sosial dan Olahraga Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Rustamadji, M.Si. Selaku Rektor Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong.
2. Dr. Roni Andri Pratama, M.Pd. Selaku Dekan Fakultas Pendidikan Bahasa, Sosial dan Olahraga, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong
3. Dr. Ihsan, S.Pd., M.Pd. Selaku Kaprodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
4. Aldilla Yulia Wielys Sutikno, M.H. Selaku Dosen Pembimbing I yang selalu membantu serta memberikan motivasi, dan masukan selama menyusun proposal ini.
5. Ernawati Simatupang, M.Pd. Selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memimbing dengan penuh ketelitian dan kesabaran pada saya Semoga ilmu yang Bapak, berikan mendapatkan berkat dan di berkati dari yang Maha Kuasa.
6. Seluruh Dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong.
7. Teman-teman seperjuangan semua yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada saya.
8. Keluarga yang selalu mendukung dan mendoakan kelancaran proses studi hingga sampai pada tahap ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan proposal penelitian ini masih terdapat kekurangan dan keterbatasan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran serta masukan yang bersifat membangun dari semua pihak. Semoga proposal ini dapat bermanfaat dan memberikan ilmu pengetahuan bagi pembaca. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak.

Sorong, 3 April 2026

Peneliti,

Musa Rayar

NIM. 148720522035

DAFTAR ISI

COVER

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Operasional.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
A. Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia	9
1. Hak Warga Negara	9
2. Kewajiban Warga Negara Indonesia	12
3. Hubungan antara Hak dan Kewajiban Warga Negara.....	15
B. Hak Siswa dalam konteks Warga Negara	16
1. Pengertian Hak Siswa sebagai Warga Negara	16
2. Hak Siswa Berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional	17

3. Hak Siswa atas Perlindungan dari Kekerasan dan Diskriminasi.....	17
4. Hak Siswa atas Partisipasi dan Kebebasan Berpendapat	18
5. Hak Siswa atas Lingkungan Belajar yang Kondusif	18
C. Kewajiban Siswa dalam Konteks Warga Negara Indonesia	19
1. Pengertian Kewajiban Siswa sebagai Warga Negara.....	19
2. Kewajiban Siswa Berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional	19
3. Kewajiban Siswa dalam Menjunjung Hukum dan Tata Tertib Sekolah	20
4. Kewajiban Siswa dalam Menghormati Hak Orang Lain.....	20
5. Kewajiban Siswa dalam Mengikuti Pendidikan Dasar	21
6. Kewajiban Siswa dalam Menjaga Persatuan dan Kesatuan	21
7. Kewajiban Siswa dalam Menjaga Lingkungan Sekolah	21
D. Perkembangan Moral dan Sosial Siswa	22
1. Pengertian Perkembangan Moral	22
2. Tahapan Perkembangan Moral Siswa	22
3. Perkembangan Sosial Siswa	23
4. Pengaruh Lingkungan Sosial terhadap Perkembangan Moral Siswa	23
E. Penelitian Terdahulu	23
F. Kerangka Pikir	25
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	28
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	29
C. Subjek Penelitian.....	29
D. Teknik Pengumpulan Data.....	31
E. Instrumen Penelitian.....	32

F. Teknik Analisis Data.....	33
G. Keabsahan Data.....	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	35
A. Hasil Penelitian	35
1. Profil Sekolah dan Struktur Organisasi	35
2. Pemahaman Siswa SMP Negeri 5 Kota Sorong terhadap Hak dan Kewajiban sebagai Warga Negara Indonesia	36
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Siswa tentang Hak dan Kewajiban sebagai Warga Negara Indonesia	40
B. Pembahasan.....	44
1. Pemahaman Siswa tentang Hak dan Kewajiban sebagai Warga Negara Indonesia di SMP Negeri 5 Kota Sorong	44
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Siswa tentang Hak dan Kewajiban sebagai Warga Negara Indonesia	Error! Bookmark not defined.
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	48
A. Kesimpulan.....	48
B. Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN-LAMPIRAN	88

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Hak-Hak Warga Negara dalam UUD !945	13
Tabel 2.2 Kewajiban Warga Negara dalam UUD !945	17
Tabel 2.3 Hubungan antara Hak dan Kewajiban warga negara	20
Tabel 3.1 Subjek Penelitian	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka pikir	34
---------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia, merupakan negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menempatkan hak dan kewajiban sebagai landasan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan persamaan kedudukan seluruh warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan sekaligus kewajiban untuk menjunjung tinggi hukum tanpa pengecualian. Ketentuan ini mencerminkan prinsip equality before the law yang menjadi salah satu pilar utama negara demokratis berdasarkan hukum (Simamora 2014).

Selain persamaan di hadapan hukum, UUD NRI 1945 juga mengatur hak dan kewajiban warga negara dalam berbagai dimensi kehidupan. Pasal 27 ayat (2) menjamin hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, sementara Pasal 27 ayat (3) menegaskan hak sekaligus kewajiban setiap warga negara untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 29 ayat (2) menjamin kebebasan beragama dan beribadah, Pasal 30 ayat (1) mengatur hak dan kewajiban bela negara, serta Pasal 31 ayat (1) dan (2) menegaskan hak setiap warga negara atas pendidikan sekaligus kewajiban mengikuti pendidikan dasar yang dibiayai oleh negara. Keseluruhan ketentuan ini menunjukkan bahwa hak dan kewajiban warga negara bersifat resiprokal dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain (Hastangka, Armawi, and Kaelan 2019).

Ketentuan konstitusional tersebut dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya Pasal 3, yang menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya berorientasi pada penguasaan pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan karakter,

moral, dan kesadaran kewarganegaraan peserta didik (Susilawati and Widagdo 2024).

Pemahaman tentang hak dan kewajiban warga negara merupakan bagian dari Kompetensi Dasar yang diwajibkan dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di tingkat sekolah dasar hingga menengah. Pembelajaran PPKn selayaknya tidak hanya mengajarkan konsep teoritis, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pada peserta didik. Sejalan dengan hal tersebut, (Nafiati 2021) menegaskan bahwa pemahaman merupakan kemampuan kognitif tingkat kedua yang mencakup kemampuan menafsirkan, mencontohkan, mengklasifikasikan, meringkas, menyimpulkan, membandingkan, dan menjelaskan suatu konsep secara bermakna.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pemahaman siswa tentang hak dan kewajiban warga negara di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Hasil penelitian (Arifin 2025) menunjukkan bahwa sebagian besar siswa SMP hanya memahami hak dan kewajiban sebatas pengetahuan tekstual dari buku pelajaran, tanpa mampu mengaitkannya secara bermakna dengan pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, (Purba 2024) menemukan bahwa penguasaan siswa terhadap konsep kewajiban lebih rendah dibandingkan pemahamannya terhadap hak, yang mengindikasikan adanya ketimpangan dalam internalisasi nilai-nilai kewarganegaraan. Kondisi ini menunjukkan perlunya pendekatan pembelajaran yang lebih kontekstual agar siswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Data pada tingkat satuan pendidikan di daerah juga menunjukkan sejumlah tantangan yang perlu dikaji secara mendalam. Di wilayah Provinsi Papua Barat Daya, termasuk Kota Sorong, tantangan di bidang pendidikan masih cukup signifikan. (Kebudayaan 2021) melaporkan bahwa indeks capaian pendidikan di wilayah Papua Barat Daya masih berada di bawah rata-rata nasional, mencakup aspek ketersediaan fasilitas, kualitas pembelajaran, dan kesiapan satuan pendidikan. Kondisi ini secara langsung berimplikasi pada kualitas proses pembelajaran di sekolah-sekolah di wilayah tersebut, termasuk dalam

pembelajaran PPKn yang menjadi wahana utama pembentukan kesadaran kewarganegaraan siswa.

Tantangan kualitas pendidikan di wilayah timur Indonesia, termasuk Papua Barat Daya, juga didokumentasikan dalam berbagai kajian akademik. (AYUDHIA et al. 2023) melaporkan bahwa ketidakhadiran guru dan rendahnya kualitas pembelajaran di wilayah Indonesia timur berdampak negatif secara signifikan terhadap capaian belajar siswa secara umum. Dalam konteks pembelajaran PPKn khususnya, rendahnya konsistensi kehadiran tenaga pendidik dapat menyebabkan materi tentang hak dan kewajiban warga negara tidak tersampaikan secara utuh dan berkelanjutan, sehingga pemahaman siswa menjadi terfragmentasi dan tidak sistematis (Fahmi, Muchtarom, and Winarno 2023).

Selain tantangan kualitas pembelajaran, aspek integritas dan perilaku siswa juga turut memengaruhi pemahaman serta pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Hasil kajian (Lickona 2013) menegaskan bahwa pendidikan karakter yang tidak berjalan efektif di sekolah berkontribusi pada lemahnya perilaku disiplin, kejujuran, dan tanggung jawab siswa. Kondisi ini sejalan dengan temuan (Zubaedi 2015) yang menyatakan bahwa banyak siswa di Indonesia menunjukkan kecenderungan perilaku yang tidak konsisten antara pengetahuan moral yang dimiliki dengan tindakan nyata dalam kehidupan, seperti ketidakdisiplinan, rendahnya etika sosial, dan kurangnya rasa tanggung jawab sebagai warga sekolah. Data ini menunjukkan bahwa penguatan pemahaman tentang hak dan kewajiban tidak cukup hanya melalui pembelajaran kognitif, tetapi harus diintegrasikan dengan pembiasaan nilai dan pembentukan karakter secara menyeluruh.

Konteks pendidikan di Kota Sorong dan sekitarnya mencerminkan tantangan nyata dalam pemahaman siswa terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara. SMP Negeri 5 Kota Sorong, sebagai salah satu sekolah menengah pertama negeri di wilayah ini, memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan kesadaran kewarganegaraan siswa. Berdasarkan pengamatan awal di lapangan, masih terdapat perilaku siswa yang menunjukkan bahwa pemahaman tentang hak

dan kewajiban belum sepenuhnya terinternalisasi, seperti ketidakpatuhan terhadap tata tertib sekolah, kurangnya kesadaran terhadap tanggung jawab belajar, serta rendahnya partisipasi dalam kegiatan sosial di lingkungan sekolah (hasil observasi awal, 2024).

Fenomena tersebut tampak dari beberapa aspek yang saling berkaitan. Pertama, pemahaman siswa terhadap hak dan kewajiban masih bersifat teoritis dan dangkal; banyak siswa hanya mengetahui konsep tersebut dari materi pelajaran PPKn, namun kesadaran untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari masih minim, seperti enggan menyampaikan pendapat dalam diskusi kelas atau tidak menghormati hak teman yang berbeda pendapat. Kedua, kepatuhan terhadap aturan sekolah belum optimal, ditandai dengan perilaku terlambat masuk kelas, tidak memakai seragam sesuai ketentuan, dan membuang sampah sembarangan, yang mencerminkan lemahnya internalisasi kewajiban sebagai warga sekolah yang bertanggung jawab. Ketiga, partisipasi siswa dalam kegiatan sekolah maupun kegiatan sosial masih rendah, yang dapat mencerminkan kurangnya pemahaman bahwa hak dan kewajiban adalah dua sisi yang tidak dapat dipisahkan (Rahman et al. 2024).

Berdasarkan kompleksitas permasalahan yang telah diuraikan, diperlukan sebuah pendekatan penelitian yang mampu menggali secara mendalam bagaimana siswa memaknai, memahami, dan menginternalisasi konsep hak dan kewajiban sebagai warga negara. Pendekatan kualitatif dipilih dalam penelitian ini karena dinilai paling sesuai untuk mengeksplorasi pemahaman yang bersifat subjektif dan kontekstual. (Creswell and Poth 2016) menyatakan bahwa penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami makna yang dikonstruksi oleh individu atau kelompok terhadap suatu permasalahan sosial secara holistik dan mendalam, melalui teknik pengumpulan data seperti wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi.

Seluruh uraian latar belakang di atas, terdapat kesenjangan yang nyata antara harapan normatif tentang pemahaman hak dan kewajiban warga negara

dengan realitas yang ditemukan di lapangan, khususnya di SMP Negeri 5 Kota Sorong. Kesenjangan inilah yang mendorong dilakukannya penelitian dengan judul **"Analisis Pemahaman Siswa tentang Hak dan Kewajiban sebagai Warga Negara Indonesia di SMP Negeri 5 Kota Sorong"**, yang bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana siswa memahami hak dan kewajiban mereka serta faktor-faktor yang memengaruhi pemahaman tersebut di lingkungan sekolah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman siswa SMP Negeri 5 Kota Sorong terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia?
2. Faktor- faktor apa saja yang mempengaruhi pemahaman siswa tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pemahaman Siswa SMP Negeri 5 Kota Sorong terhadap hak dan Kewajiban sebagai Warga Negara Indonesia.
2. Untuk mengidentifikasi Faktor- faktor apa yang mempengaruhi pemahaman siswa tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan uraian mengenai kontribusi yang diharapkan dari hasil penelitian, baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun bagi praktik pendidikan. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoretis dan praktis, khususnya dalam bidang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian ilmiah di bidang pendidikan kewarganegaraan, khususnya yang berkaitan dengan pemahaman siswa tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Hasil penelitian ini dapat memperkaya perspektif teoretis mengenai konsep pemahaman siswa dengan mengaitkannya pada aspek kewarganegaraan dan perkembangan moral sosial peserta didik di jenjang pendidikan menengah pertama.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang membahas tema serupa, terutama dalam konteks analisis pemahaman siswa terhadap nilai-nilai konstitusional dan penerapannya dalam kehidupan sekolah. Dengan demikian, penelitian ini dapat memperkuat landasan konseptual dalam studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

a. Bagi Sekolah

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak sekolah dalam melihat sejauh mana siswa memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia. Temuan penelitian dapat digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki iklim sekolah, khususnya dalam penanaman nilai disiplin, tanggung jawab, dan kesadaran hukum di lingkungan sekolah.

b. Bagi Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Penelitian ini dapat memberikan gambaran nyata mengenai tingkat pemahaman siswa tentang hak dan kewajiban warga negara. Informasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh guru PPKn untuk merancang strategi pembelajaran yang lebih kontekstual, partisipatif, dan berorientasi pada pemahaman serta penerapan nilai-nilai kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari siswa.

c. Bagi Siswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran siswa mengenai pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Dengan pemahaman yang lebih baik, siswa diharapkan mampu menerapkan nilai-nilai kewarganegaraan secara bertanggung jawab dalam perilaku sehari-hari, khususnya di lingkungan sekolah.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi rujukan dan bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji topik pemahaman siswa, hak dan kewajiban warga negara, atau pendidikan kewarganegaraan dengan pendekatan dan konteks yang berbeda.

E. Definisi Operasional

Definisi konsep dalam penelitian berfungsi untuk memberikan penjelasan yang jelas agar istilah-istilah utama yang digunakan dalam penelitian dipahami secara konsisten oleh peneliti dan pembaca. Penjelasan ini membantu menghindari perbedaan interpretasi dan memperkuat fokus penelitian (Sugiyono 2013).

1. Pemahaman Siswa

Pemahaman siswa dalam penelitian ini adalah kemampuan kognitif siswa untuk mengetahui, menafsirkan, dan memaknai konsep hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia, serta mengaitkannya dengan situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah. Pemahaman ini tidak hanya dilihat dari kemampuan siswa menyebutkan pengertian atau contoh, tetapi juga dari cara siswa menjelaskan makna hak dan kewajiban serta menunjukkan kesadaran terhadap penerapannya dalam perilaku.

2. Hak Warga Negara Indonesia

Hak warga negara Indonesia adalah segala sesuatu yang secara konstitusional melekat pada diri warga negara dan dijamin oleh negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945. Dalam konteks penelitian ini, hak warga negara difokuskan pada hak yang relevan dengan kehidupan siswa, khususnya hak memperoleh pendidikan, hak mendapatkan perlakuan adil, serta hak menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab di lingkungan sekolah.

3. Kewajiban Warga Negara Indonesia

Kewajiban warga negara Indonesia adalah tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini, kewajiban warga negara dikaitkan dengan kewajiban siswa sebagai pelajar, seperti menaati peraturan sekolah, menghormati guru dan sesama siswa, serta menjaga ketertiban dan kedisiplinan sebagai wujud tanggung jawab kewarganegaraan.

4. SMP Negeri 5 Kota Sorong

Lingkungan sekolah adalah seluruh kondisi fisik, sosial, dan kultural yang ada di sekolah, termasuk interaksi antara siswa, guru, dan warga sekolah lainnya, yang memengaruhi pembentukan pemahaman serta perilaku siswa. Dalam penelitian ini, lingkungan sekolah menjadi konteks utama tempat siswa memahami dan menerapkan hak serta kewajibannya sebagai warga negara.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia

1. Hak Warga Negara

Hak warga negara Indonesia adalah hak-hak yang dimiliki oleh setiap orang karena statusnya sebagai warga negara Republik Indonesia yang dijamin dan dilindungi oleh negara berdasarkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan (UUD NRI 1945). Hak ini memberikan kewenangan kepada warga negara untuk memperoleh perlindungan hukum, kesempatan, serta perlakuan yang adil dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Asshiddiqie 2011).

Secara konstitusional, hak warga negara ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam Pasal 27 sampai Pasal 34 serta Bab XA tentang Hak Asasi Manusia. Konstitusi tersebut menegaskan bahwa negara menjamin persamaan kedudukan, kebebasan, serta kesejahteraan bagi seluruh warga negara (Tutik 2018). Dengan demikian, hak warga negara Indonesia merupakan hak konstitusional yang wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara sebagai bagian dari prinsip negara hukum dan demokrasi.

Hak warga negara Indonesia meliputi berbagai bidang, seperti hukum, politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Berikut ini adalah beberapa hak utama warga negara Indonesia berdasarkan UUD NRI 1945:

Tabel 2.1 Hak-Hak Warga Negara dalam UUD 1945

No	Jenis Hak Warga Negara	Dasar Hukum
1	Hak persamaan kedudukan di depan hukum	Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945
2	Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak	Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945

3	Hak bela negara	Pasal 27 ayat (3) UUD NRI 1945
4	Hak berserikat, berkumpul, dan berpendapat	Pasal 28 UUD NRI 1945
5	Hak kebebasan beragama	Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945
6	Hak memperoleh pendidikan	Pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945
7	Hak atas kesejahteraan sosial	Pasal 34 UUD NRI 1945
8	Hak atas jaminan sosial dan perlindungan	Pasal 28H UUD NRI 1945

Hak persamaan di depan hukum merupakan hak fundamental yang menjamin bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama tanpa diskriminasi atas dasar suku, agama, ras, maupun status sosial. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945. Dalam perspektif negara hukum, persamaan di depan hukum merupakan pilar utama yang menjamin keadilan dan kepastian hukum. (Abadi and SH 2023) menyatakan bahwa prinsip *equality before the law* menunjukkan bahwa tidak boleh ada perlakuan istimewa maupun diskriminatif dalam penyelenggaraan negara demokratis.

Selain itu, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak dijamin dalam UUD NRI 1945 Pasal 27 ayat (2). Hak ini menegaskan bahwa negara bertanggung jawab menciptakan kebijakan yang memungkinkan warga negara memperoleh kesempatan kerja dan kehidupan yang bermartabat. (Budiardjo 2003) menyatakan bahwa hak ekonomi seperti hak atas pekerjaan merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dalam sistem demokrasi.

Hak bela negara juga menjadi bagian penting dari hak warga negara sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945 Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (1). Hak ini menunjukkan adanya hubungan timbal balik antara negara dan warga negara dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Winarno 2006) menjelaskan bahwa bela negara bukan hanya

kewajiban, tetapi juga hak konstitusional yang mencerminkan partisipasi warga negara dalam mempertahankan eksistensi negara.

Dalam kehidupan demokratis, hak berserikat, berkumpul, dan mengemukakan pendapat sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945 Pasal 28 menjadi dasar partisipasi politik warga negara. Kebebasan ini memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasi secara terbuka dan bertanggung jawab. (Budiardjo 2003) menegaskan bahwa kebebasan berpendapat merupakan indikator utama demokrasi karena memberikan ruang partisipasi aktif bagi warga negara dalam proses pemerintahan.

Hak kebebasan beragama dijamin dalam UUD NRI 1945 Pasal 29 ayat (2) serta diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak ini memberikan jaminan bahwa setiap warga negara bebas memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai keyakinannya tanpa paksaan. (UUD 1945) menegaskan bahwa dalam perspektif hak asasi manusia, kebebasan beragama termasuk hak yang bersifat mendasar dan tidak dapat dikurangi secara sewenang-wenang.

Selanjutnya, hak atas pendidikan sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945 Pasal 31 ayat (1) menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan memiliki tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa serta membentuk karakter warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya. Dalam konteks demokrasi, pendidikan menjadi sarana pembentukan warga negara yang partisipatif dan bertanggung jawab (Susilawati and Widagdo 2024).

Hak atas kesejahteraan sosial ditegaskan dalam UUD NRI 1945 Pasal 34 ayat (1), yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab sosial untuk melindungi kelompok rentan demi terwujudnya keadilan sosial (Abadi and SH 2023).

Hak atas jaminan sosial dan perlindungan diatur dalam UUD NRI 1945 Pasal 28H, yang mencakup hak atas pelayanan kesehatan, rasa aman, dan

lingkungan hidup yang baik. Hak ini mempertegas bahwa negara berkewajiban menjamin kualitas hidup warga negara secara menyeluruh (Tutik 2018).

Dengan demikian, hak-hak warga negara Indonesia memiliki landasan konstitusional yang kuat dan didukung oleh teori para ahli, sehingga tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki dimensi konseptual yang penting untuk dianalisis dalam penelitian mengenai pemahaman siswa terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara.

2. Kewajiban Warga Negara Indonesia

Kewajiban warga negara adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap warga negara sebagai bentuk tanggung jawab terhadap negara, hukum, dan kehidupan bermasyarakat. Kewajiban merupakan konsekuensi dari status kewarganegaraan yang tidak hanya memberikan hak, tetapi juga menuntut peran aktif dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan keberlangsungan negara.

Secara konstitusional, kewajiban warga negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Konstitusi menegaskan bahwa setiap warga negara wajib menjunjung hukum dan pemerintahan, ikut serta dalam pembelaan negara, serta menghormati hak asasi manusia orang lain.

Dalam perspektif negara hukum demokratis, kewajiban warga negara merupakan bagian integral dari sistem konstitusi karena menjamin keseimbangan antara hak dan tanggung jawab (Abadi and SH 2023). Tanpa pelaksanaan kewajiban, hak-hak yang dimiliki warga negara tidak dapat berjalan secara tertib dan adil. (Rahman et al. 2024) menegaskan bahwa kesadaran warga negara yang baik adalah kesadaran yang mampu menempatkan hak dan kewajiban secara seimbang sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis.

Dengan demikian, kewajiban warga negara dapat dipahami sebagai bentuk partisipasi aktif dan kesadaran hukum untuk mendukung tercapainya tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD NRI 1945.

UUD NRI 1945 sebagai hukum dasar tertinggi negara tidak hanya mengatur hak-hak warga negara, tetapi juga secara tegas menetapkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara. (Abadi and SH 2023) menegaskan bahwa kewajiban konstitusional tersebut bukan sekadar norma hukum formal, melainkan cerminan nilai-nilai Pancasila yang harus diwujudkan secara nyata dalam perilaku sehari-hari, termasuk di lingkungan sekolah. (Winarno 2006) menambahkan bahwa kesadaran terhadap kewajiban konstitusional harus ditanamkan sejak dini melalui pendidikan kewarganegaraan agar generasi muda tumbuh menjadi warga negara yang tidak hanya menuntut hak, tetapi juga dengan penuh kesadaran melaksanakan kewajibannya. Kewajiban-kewajiban pokok warga negara berdasarkan UUD NRI 1945 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2 Kewajiban Warga Negara dalam UUD NRI 1945

No	Kewajiban Warga Negara	Dasar Hukum	Makna Kewajiban
1	Menjunjung hukum dan pemerintahan	Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945	Setiap warga negara wajib menaati peraturan perundang-undangan dan menghormati pemerintahan yang sah tanpa terkecuali
2	Ikut serta dalam upaya pembelaan negara	Pasal 27 ayat (3) UUD NRI 1945	Setiap warga negara wajib berkontribusi menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI sesuai kemampuan masing-masing
3	Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara	Pasal 30 ayat (1) UUD NRI 1945	Pertahanan dan keamanan negara adalah tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa, bukan hanya TNI dan POLRI
4	Menghormati hak asasi manusia orang lain	Pasal 28J ayat (1) UUD NRI	Kebebasan individu dibatasi oleh hak orang lain sehingga setiap warga negara wajib saling

		1945	menghormati
5	Tunduk pada pembatasan yang ditetapkan undang-undang	Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945	Tidak ada hak yang mutlak; setiap hak dibatasi demi kepentingan umum, moral, dan ketertiban masyarakat
6	Mengikuti pendidikan dasar	Pasal 31 ayat (2) UUD NRI 1945	Setiap warga negara wajib menempuh pendidikan dasar sebagai fondasi pembentukan sumber daya manusia berkualitas

Berdasarkan tabel di atas, kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 mengandung makna bahwa ketaatan terhadap hukum bukan semata-mata karena sanksi, melainkan karena kesadaran bahwa hukum adalah instrumen utama mewujudkan ketertiban dan keadilan (Tutik 2018). Bagi siswa, kewajiban ini tercermin dalam kepatuhan terhadap tata tertib sekolah dan menghormati keputusan guru.

Kewajiban bela negara dalam Pasal 27 ayat (3) tidak hanya bermakna konteks militer, tetapi juga mencakup semangat belajar sungguh-sungguh, cinta tanah air, dan penghargaan terhadap keberagaman budaya (Winarno 2006). Sementara itu, kewajiban ikut serta dalam pertahanan dan keamanan pada Pasal 30 ayat (1) dalam konteks sekolah dapat diwujudkan melalui menjaga ketertiban, menghindari perundungan, serta menciptakan suasana belajar yang kondusif (Dharma 2020).

Kewajiban menghormati hak asasi manusia orang lain pada Pasal 28J ayat (1) menegaskan bahwa kebebasan individu selalu dibatasi oleh hak orang lain. (Huda and Sh 2024) menyatakan bahwa kesadaran menghormati hak orang lain merupakan fondasi kehidupan sosial yang harmonis dan berkeadilan. Adapun kewajiban tunduk pada pembatasan undang-undang dalam Pasal 28J ayat (2) mempertegas bahwa tidak ada hak yang bersifat mutlak karena setiap hak selalu beriringan dengan tanggung jawab sosial (Abadi and SH 2023).

Kewajiban mengikuti pendidikan dasar dalam Pasal 31 ayat (2) mempertegas bahwa pendidikan bukan semata-mata hak, tetapi juga kewajiban konstitusional. (Dharma 2020) menyatakan bahwa melalui pendidikan, warga negara membentuk kesadaran kewarganegaraan yang diperlukan untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan demokratis.

Keseluruhan kewajiban tersebut saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan utuh. (MS 2001) menegaskan bahwa pelaksanaan kewajiban yang dilandasi nilai Pancasila merupakan wujud nyata komitmen moral warga negara terhadap bangsa dan negaranya. Oleh karena itu, pemahaman siswa terhadap kewajiban-kewajiban konstitusional ini menjadi fondasi penting pembentukan karakter warga negara yang bertanggung jawab sejak usia dini.

3. Hubungan antara Hak dan Kewajiban Warga Negara

Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan bernegara. Keduanya ibarat dua sisi mata uang yang saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain. (Rahman et al. 2024) menyatakan bahwa kesadaran warga negara yang baik adalah kesadaran yang mampu menempatkan hak dan kewajiban secara seimbang, di mana pemenuhan kewajiban tidak semata-mata didorong oleh ketakutan akan sanksi, melainkan oleh kesadaran moral dan tanggung jawab sebagai bagian dari komunitas berbangsa dan bernegara.

Dalam perspektif konstitusional, hubungan antara hak dan kewajiban bersifat resiprokal, artinya keduanya saling mensyaratkan dan tidak dapat berdiri sendiri. (Abadi and SH 2023) menjelaskan bahwa sistem konstitusi Indonesia menempatkan hak dan kewajiban dalam satu kesatuan yang tak terpisahkan karena keduanya sama-sama bersumber dari nilai-nilai Pancasila yang menjunjung tinggi keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan bersama. (Tutik 2018) menambahkan bahwa dalam negara hukum demokratis, seseorang baru dapat sepenuhnya menikmati haknya apabila ia juga telah menunaikan kewajibannya, sehingga antara hak dan kewajiban terdapat hubungan kausalitas yang tidak bisa diabaikan.

Tabel 2.3 Hubungan antara Hak dan Kewajiban Warga Negara

No	Hak Warga Negara	Dasar Hukum	Kewajiban yang Bersesuaian	Dasar Hukum
1	Hak persamaan kedudukan di depan hukum	Pasal 27 ayat (1)	Kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan	Pasal 27 ayat (1)
2	Hak atas pekerjaan dan penghidupan layak	Pasal 27 ayat (2)	Kewajiban berkontribusi dalam pembangunan nasional	Pasal 27 ayat (3)
3	Hak bela negara	Pasal 27 ayat (3)	Kewajiban ikut serta dalam pertahanan negara	Pasal 30 ayat (1)
4	Hak kebebasan berpendapat	Pasal 28	Kewajiban menghormati hak orang lain	Pasal 28J ayat (1)
5	Hak kebebasan beragama	Pasal 29 ayat (2)	Kewajiban menghormati kebebasan beragama orang lain	Pasal 28J ayat (1)
6	Hak memperoleh pendidikan	Pasal 31 ayat (1)	Kewajiban mengikuti pendidikan dasar	Pasal 31 ayat (2)
7	Hak atas jaminan sosial	Pasal 28H	Kewajiban tunduk pada pembatasan undang-undang	Pasal 28J ayat (2)

B. Hak Siswa dalam konteks Warga Negara

1. Pengertian Hak Siswa sebagai Warga Negara

Siswa sebagai bagian dari warga negara Indonesia memiliki hak-hak yang secara konstitusional dijamin oleh negara. Hak siswa tidak hanya terbatas pada konteks pendidikan semata, tetapi juga mencakup hak-hak dasar yang melekat pada dirinya sebagai warga negara. Menurut (Soemantri 2001), pendidikan

kewarganegaraan harus mampu menanamkan kesadaran bahwa setiap peserta didik adalah subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang setara dengan warga negara lainnya.

2. Hak Siswa Berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional

Secara yuridis, hak-hak siswa sebagai peserta didik diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), khususnya Pasal 12 ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap peserta didik berhak:

- a. Mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama
- b. Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya
- c. Mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi dan membutuhkan
- d. Mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu
- e. Pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara
- f. Menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan

Ketentuan ini menegaskan bahwa negara berkewajiban memastikan setiap siswa memperoleh layanan pendidikan yang adil, merata, dan berkualitas tanpa diskriminasi (Kurniawan et al. 2022).

3. Hak Siswa atas Perlindungan dari Kekerasan dan Diskriminasi

Hak siswa atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi di lingkungan sekolah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 54, menegaskan bahwa anak di lingkungan sekolah wajib mendapatkan perlindungan

dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah, atau teman-temannya.

Sejalan dengan itu, (PARLINDUNGAN and YOSEP 2024) menyatakan bahwa perlindungan hukum terhadap siswa di sekolah merupakan implementasi nyata dari prinsip *best interest of the child* yang menjamin bahwa kepentingan terbaik anak selalu menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan pendidikan.

4. Hak Siswa atas Partisipasi dan Kebebasan Berpendapat

Dalam konteks pendidikan demokratis, siswa memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran, dan terlibat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan sekolah. Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat yang berlaku bagi seluruh warga negara, termasuk siswa.

(Budimansyah 2008) menegaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan yang efektif harus memberikan ruang bagi siswa untuk berlatih berdemokrasi di sekolah sebagai laboratorium demokrasi, sehingga siswa tidak hanya memahami hak berpendapat secara teoritis, tetapi juga mampu mempraktikkannya secara bertanggung jawab.

5. Hak Siswa atas Lingkungan Belajar yang Kondusif

Setiap siswa berhak mendapatkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan kondusif sebagai syarat terpenuhinya hak atas pendidikan yang berkualitas. (Mulyasa 2022) menjelaskan bahwa lingkungan sekolah yang kondusif merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya proses pembelajaran yang bermakna, di mana siswa dapat mengembangkan potensinya secara optimal tanpa tekanan atau rasa takut.

Lebih lanjut, (Wiyani 2015) menambahkan bahwa sekolah sebagai institusi publik bertanggung jawab menciptakan iklim sekolah yang positif sebagai bentuk pemenuhan hak siswa atas lingkungan belajar yang mendukung pembentukan karakter dan kesadaran kewarganegaraan secara menyeluruh.

C. Kewajiban Siswa dalam Konteks Warga Negara Indonesia

1. Pengertian Kewajiban Siswa sebagai Warga Negara

Kewajiban siswa dalam konteks kewarganegaraan merupakan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh setiap peserta didik, tidak hanya sebagai anggota komunitas sekolah, tetapi juga sebagai bagian dari warga negara Indonesia. Kewajiban ini bersumber dari nilai-nilai Pancasila dan ketentuan konstitusional yang mengatur hubungan timbal balik antara negara dan warga negaranya.

(Winataputra 2012) menegaskan bahwa siswa sebagai warga negara muda (young citizens) memiliki kewajiban yang bersifat ganda, yaitu kewajiban sebagai peserta didik dalam institusi pendidikan dan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kedua dimensi kewajiban ini saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

2. Kewajiban Siswa Berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional

Secara yuridis, kewajiban siswa sebagai peserta didik diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya Pasal 12 ayat (2), yang menyatakan bahwa setiap peserta didik berkewajiban untuk:

- a. Menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan
- b. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Selain itu, Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2003 menegaskan bahwa pendidikan nasional bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung

jawab. Dengan demikian, setiap siswa berkewajiban untuk aktif mengembangkan dirinya sesuai tujuan pendidikan nasional.

3. Kewajiban Siswa dalam Menjunjung Hukum dan Tata Tertib Sekolah

Salah satu kewajiban mendasar siswa sebagai warga negara adalah menjunjung tinggi hukum dan peraturan yang berlaku, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945. Dalam konteks sekolah, kewajiban ini diwujudkan melalui kepatuhan terhadap tata tertib sekolah sebagai representasi dari sistem hukum dalam skala mikro.

(Daryanto 2013) menjelaskan bahwa kepatuhan siswa terhadap tata tertib sekolah bukan semata-mata karena ketakutan akan sanksi, melainkan harus dilandasi oleh kesadaran moral bahwa disiplin merupakan bentuk tanggung jawab nyata seorang warga negara yang baik (*good citizen*). Internalisasi nilai disiplin sejak dini di lingkungan sekolah akan membentuk karakter siswa yang taat hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di masa mendatang.

4. Kewajiban Siswa dalam Menghormati Hak Orang Lain

Sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (1) UUD NRI 1945, setiap warga negara wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Dalam konteks kehidupan sekolah, kewajiban ini tercermin dalam perilaku siswa yang menghargai pendapat teman, tidak melakukan perundungan (*bullying*), serta menjaga kerukunan dan toleransi antarwarga sekolah.

(Zubaedi 2015), menegaskan bahwa pendidikan karakter yang efektif harus mampu menanamkan kesadaran pada siswa bahwa menghormati hak orang lain merupakan kewajiban moral sekaligus kewajiban konstitusional yang tidak dapat diabaikan. Siswa yang memahami kewajiban ini akan mampu membangun relasi sosial yang harmonis, baik di lingkungan sekolah maupun dalam kehidupan bermasyarakat yang lebih luas.

5. Kewajiban Siswa dalam Mengikuti Pendidikan Dasar

Pasal 31 ayat (2) UUD NRI 1945 secara tegas menyatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Ketentuan ini menegaskan bahwa mengikuti pendidikan bukan hanya hak, tetapi juga kewajiban konstitusional yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara, termasuk siswa SMP yang berada pada jenjang pendidikan wajib belajar sembilan tahun.

Sisdiknas Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003 mempertegas bahwa setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Dengan demikian, kehadiran siswa di sekolah, keaktifan dalam proses pembelajaran, serta kesungguhan dalam belajar merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban konstitusional yang harus disadari oleh setiap siswa (Kurniawan et al. 2022)

6. Kewajiban Siswa dalam Menjaga Persatuan dan Kesatuan

Sebagai warga negara yang majemuk, siswa memiliki kewajiban untuk senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, sebagaimana tercermin dalam Sila Ketiga Pancasila: Persatuan Indonesia. Dalam kehidupan sekolah yang terdiri dari beragam latar belakang suku, agama, dan budaya, kewajiban ini diwujudkan melalui sikap toleransi, saling menghargai perbedaan, dan menghindari segala bentuk perpecahan.

(Fahmi et al. 2023) menyatakan bahwa kesadaran akan persatuan dan kesatuan harus ditanamkan sejak dini melalui pendidikan kewarganegaraan, agar generasi muda memiliki komitmen yang kuat terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Siswa yang mampu menjaga persatuan di lingkungan sekolahnya merupakan cerminan nyata dari warga negara yang bertanggung jawab.

7. Kewajiban Siswa dalam Menjaga Lingkungan Sekolah

Kewajiban menjaga lingkungan merupakan bagian dari tanggung jawab warga negara sebagaimana tersirat dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 yang

menjamin hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak ini berbanding lurus dengan kewajiban setiap warga negara, termasuk siswa, untuk turut serta menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan.

(Narwanti 2011) menjelaskan bahwa pembiasaan menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan sekolah merupakan salah satu bentuk pendidikan karakter berbasis kewajiban warga negara yang paling mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari siswa. Perilaku sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya dan merawat fasilitas sekolah merupakan wujud nyata dari kesadaran kewajiban siswa sebagai warga negara yang bertanggung jawab.

D. Perkembangan Moral dan Sosial Siswa

1. Pengertian Perkembangan Moral

Perkembangan moral merupakan proses perubahan kemampuan individu dalam memahami dan menginternalisasi nilai-nilai kebaikan, keadilan, serta tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Uswatun Hasanah, menjelaskan bahwa perkembangan moral pada siswa usia remaja awal merupakan fase kritis yang menentukan pembentukan karakter jangka panjang, di mana siswa mulai mampu membedakan tindakan yang benar dan salah berdasarkan pertimbangan norma sosial, bukan sekadar berdasarkan konsekuensi pribadi.

2. Tahapan Perkembangan Moral Siswa

Siswa SMP yang berada pada rentang usia 12-15 tahun umumnya berada pada tahap perkembangan moral konvensional, di mana mereka mulai memahami pentingnya mematuhi aturan demi menjaga ketertiban sosial. (Yusuf and Sugandhi 2013) menjelaskan bahwa pada tahap ini siswa mulai menyadari bahwa aturan berfungsi menjaga keharmonisan kehidupan bersama, mulai mengembangkan rasa tanggung jawab terhadap kelompok sosialnya, serta mulai mampu mempertimbangkan sudut pandang orang lain dalam menilai suatu tindakan secara moral.

3. Perkembangan Sosial Siswa

Perkembangan sosial adalah proses di mana individu belajar berinteraksi dan membangun relasi dengan orang lain sesuai dengan norma yang berlaku. (Arifudin 2022) menjelaskan bahwa perkembangan sosial remaja ditandai oleh meningkatnya intensitas hubungan dengan teman sebaya, berkembangnya kemampuan empati, tumbuhnya kesadaran akan identitas sosial, serta meningkatnya kemampuan bekerja sama dalam situasi sosial. Dalam konteks PPKn, perkembangan sosial siswa menjadi dasar penting bagi pembentukan kesadaran kewarganegaraan yang demokratis.

4. Pengaruh Lingkungan Sosial terhadap Perkembangan Moral Siswa

Lingkungan sosial memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan moral siswa. (Hakim 2014), menjelaskan bahwa lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat secara bersama-sama membentuk nilai-nilai moral yang diinternalisasi siswa dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, sekolah memegang peran strategis karena merupakan lingkungan sosial kedua yang paling dominan dalam membentuk karakter siswa setelah keluarga.

E. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan kajian pemahaman siswa tentang hak dan kewajiban warga negara antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh (Arifin 2025), berjudul "*Pendidikan Karakter di Era Digital*" menunjukkan bahwa pemahaman siswa terhadap hak dan kewajiban warga negara masih bersifat tekstual dan terbatas pada hafalan konsep dari buku pelajaran. Siswa belum mampu mengaitkan konsep tersebut dengan kehidupan sehari-hari secara nyata. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokus kajian yaitu pemahaman siswa tentang hak dan kewajiban sebagai bagian dari pendidikan kewarganegaraan. Namun, perbedaannya adalah penelitian tersebut lebih menekankan pada aspek kognitif dan hasil belajar, sedangkan penelitian ini mengkaji secara mendalam pemaknaan siswa terhadap hak dan kewajiban serta bagaimana konsep tersebut diinternalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Hal

ini menunjukkan adanya gap penelitian berupa kurangnya kajian mendalam terkait pemahaman kontekstual dan pengalaman nyata siswa.

2. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Purba 2024), berjudul *“Implementing Citizenship Education in Elementary School: Challenges and Opportunities”* menunjukkan bahwa pemahaman siswa terhadap kewajiban lebih rendah dibandingkan pemahaman terhadap hak, sehingga terjadi ketimpangan dalam internalisasi nilai kewarganegaraan. Persamaan penelitian ini terletak pada kajian tentang pemahaman hak dan kewajiban warga negara. Namun, perbedaannya adalah penelitian tersebut berfokus pada jenjang sekolah dasar dan lebih menekankan pada tingkat penguasaan materi, sedangkan penelitian ini dilakukan pada jenjang sekolah menengah pertama dengan pendekatan kualitatif yang menggali makna dan faktor-faktor yang memengaruhi pemahaman siswa. Gap penelitian yang muncul adalah belum adanya kajian yang secara komprehensif menghubungkan pemahaman dengan faktor-faktor yang memengaruhinya dalam konteks siswa SMP.
3. Penelitian yang dilakukan oleh (Rahman et al. 2024), berjudul *“Penguatan Kecerdasan Kewargaan untuk Mengembangkan Nilai Demokratis di Perguruan Tinggi”* menunjukkan bahwa pemahaman hak dan kewajiban harus dibangun secara seimbang melalui penguatan kecerdasan kewargaan dan kesadaran moral. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan bernegara. Namun, perbedaannya terletak pada subjek dan konteks penelitian, di mana penelitian tersebut dilakukan pada mahasiswa di perguruan tinggi, sedangkan penelitian ini dilakukan pada siswa SMP yang memiliki karakteristik perkembangan moral dan sosial yang berbeda. Gap penelitian yang ditemukan adalah masih terbatasnya kajian pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terkait bagaimana pemahaman tersebut terbentuk sejak dini.
4. Penelitian yang dilakukan oleh (Fahmi et al. 2023), berjudul *“Analyzing Civics Education Teachers’ Difficulties in Applying Merdeka Curriculum”* menunjukkan bahwa kesulitan guru dalam mengimplementasikan pembelajaran berdampak pada rendahnya pemahaman siswa terhadap materi

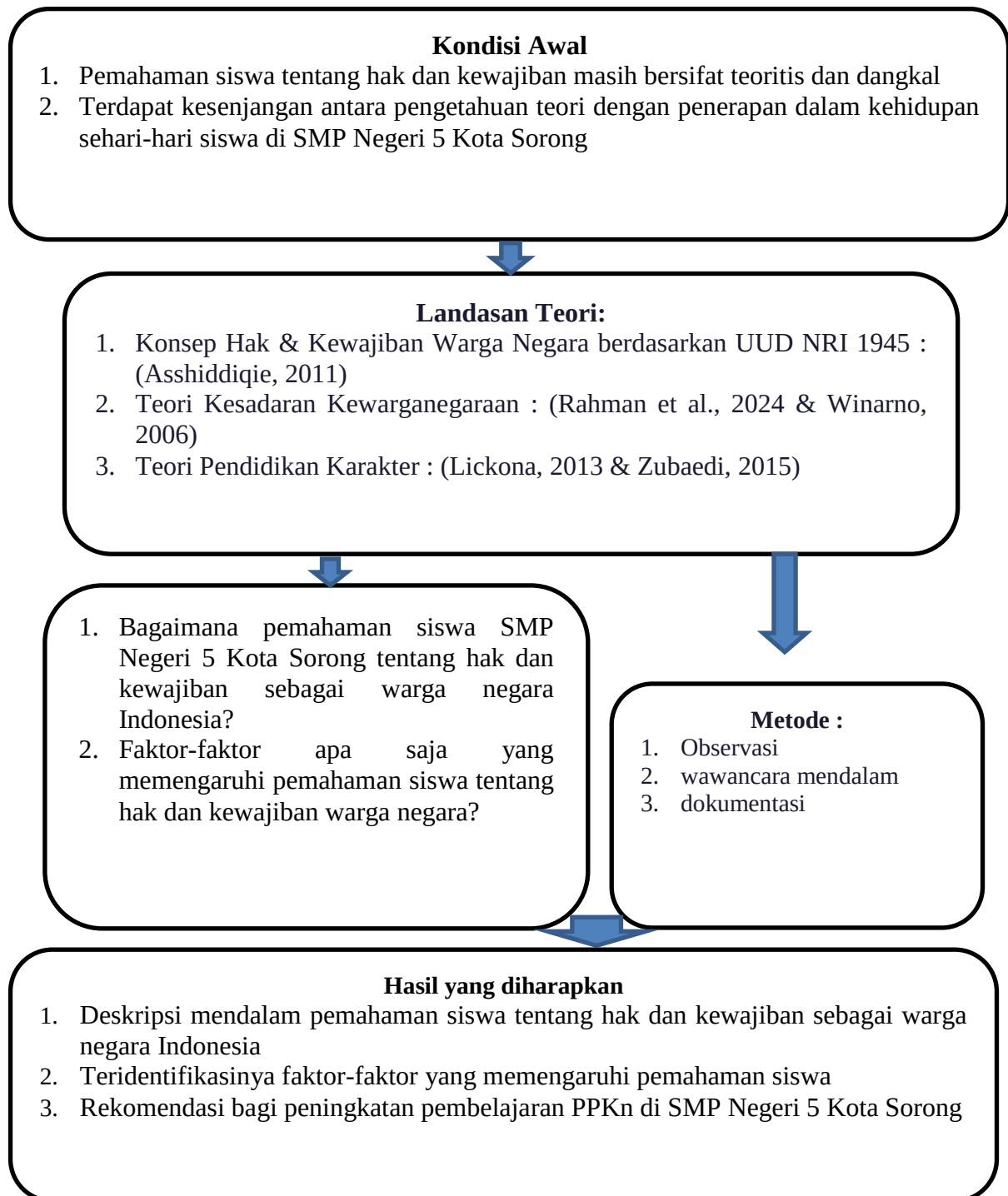
kewarganegaraan. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas faktor yang memengaruhi pemahaman siswa dalam pembelajaran PPKn. Namun, perbedaannya adalah penelitian tersebut berfokus pada kendala dari sisi guru dan implementasi kurikulum, sedangkan penelitian ini mengkaji pemahaman siswa secara langsung serta faktor internal dan eksternal yang memengaruhinya. Gap penelitian yang muncul adalah belum adanya analisis yang mengintegrasikan perspektif siswa secara langsung dalam memahami hak dan kewajiban.

5. Penelitian yang dilakukan oleh (AYUDHIA et al. 2023), berjudul “*Analisis Problematika Pendidikan Indonesia di Wilayah 3T*” menunjukkan bahwa keterbatasan fasilitas, kualitas pembelajaran, dan kondisi geografis di wilayah Indonesia timur memengaruhi capaian belajar siswa. Persamaan penelitian ini terletak pada konteks wilayah penelitian yang sama-sama berada di kawasan Indonesia timur. Namun, perbedaannya adalah penelitian tersebut membahas permasalahan pendidikan secara umum, sedangkan penelitian ini secara spesifik mengkaji pemahaman siswa tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara di lingkungan sekolah. Gap penelitian yang terlihat adalah belum adanya kajian spesifik yang menghubungkan kondisi wilayah dengan pemahaman kewarganegaraan siswa secara mendalam.

F. Kerangka Pikir

Kerangka berpikir penelitian ini disusun berdasarkan dua rumusan masalah utama, yaitu bagaimana pemahaman siswa SMP Negeri 5 Kota Sorong tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia, dan faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pemahaman tersebut.

Penelitian ini berlandaskan pada tiga teori utama, yaitu Teori Pendidikan Kewarganegaraan (Soemantri, 2001; Winataputra, 2012), Teori Kesadaran Kewarganegaraan (Rahman et al., 2024; Winarno, 2006), dan Teori Pendidikan Karakter (Lickona, 2013; Zubaedi, 2015). Secara visual, alur berpikir penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Berdasarkan bagan kerangka pikir di atas, penelitian ini berangkat dari kondisi awal yang menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman teoritis

siswa tentang hak dan kewajiban dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari di SMP Negeri 5 Kota Sorong. Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan pendekatan deskriptif kualitatif fenomenologis dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil yang diharapkan adalah deskripsi mendalam pemahaman siswa, identifikasi faktor yang memengaruhinya, serta rekomendasi bagi peningkatan kualitas pembelajaran PPKn di SMP Negeri 5 Kota Sorong.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif dipilih karena bertujuan untuk mengungkap, memahami, dan mendeskripsikan secara mendalam fenomena yang terjadi di lapangan, khususnya yang berkaitan dengan pemahaman siswa tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Sebagaimana dikemukakan oleh (Creswell 2014), penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami makna yang dikonstruksi oleh individu atau kelompok terhadap suatu permasalahan sosial secara holistik dan mendalam melalui teknik pengumpulan data seperti wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologis. (Nasir et al. 2023) menjelaskan bahwa fenomenologi berkaitan dengan kemunculan suatu benda, peristiwa, atau keadaan dalam persepsi manusia, di mana pengetahuan diperoleh melalui pengalaman sadar, sehingga fenomenologi menyiratkan membiarkan segala sesuatu memanifestasikan dirinya sebagaimana adanya. Sejalan dengan itu, (Wita and Mursal 2022) dalam Titian: Jurnal Ilmu Humaniora mengemukakan bahwa fenomenologi dalam kajian sosial berangkat dari filsafat Husserl yang memandang setiap fenomena harus digambarkan dari segala sesuatu sebagaimana adanya dan tampil sebagaimana adanya, sehingga pendekatan ini sangat relevan untuk memahami konstruksi makna dalam realitas sosial. Pendekatan fenomenologi dipilih dalam penelitian ini karena bertujuan untuk menggali dan memahami pengalaman, persepsi, serta pemaknaan yang dimiliki oleh siswa terhadap konsep hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Alasan pemilihan metode kualitatif dalam penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pemahaman siswa tentang hak dan kewajiban bersifat subjektif, kontekstual, dan tidak dapat diukur secara tunggal melalui angka atau

statistik. Penelitian ini membutuhkan eksplorasi mendalam mengenai makna, proses, dan konteks yang melingkupi pemahaman tersebut, sehingga pendekatan kualitatif dinilai paling sesuai dan relevan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 5 Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain: (1) SMP Negeri 5 Kota Sorong merupakan salah satu sekolah menengah pertama negeri yang memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan kesadaran kewarganegaraan siswa di wilayah Kota Sorong; (2) berdasarkan observasi awal, ditemukan adanya kesenjangan antara pemahaman teoritis siswa tentang hak dan kewajiban dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari; serta (3) peneliti memiliki akses dan kemudahan dalam melakukan penelitian di lokasi tersebut.

Waktu penelitian direncanakan selama kurang lebih tiga bulan, dimulai dari tahap persiapan, pengumpulan data, analisis data, hingga penyusunan laporan akhir. Jadwal penelitian akan disesuaikan dengan kalender akademik sekolah dan kesiapan para informan.

SMP Negeri 5 Kota Sorong terletak di wilayah Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Sekolah ini menyelenggarakan pendidikan pada jenjang kelas VII, VIII, dan IX dengan jumlah siswa yang cukup representatif untuk dijadikan sumber data penelitian. Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) diajarkan di seluruh jenjang kelas sebagai bagian dari kurikulum yang berlaku.

C. Subjek Penelitian

Penentuan subjek dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan subjek didasarkan pada kriteria tertentu yang dianggap paling mengetahui permasalahan dan memiliki informasi yang mendalam terkait fokus penelitian. (Sugiyono 2013) menjelaskan bahwa purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan

pertimbangan tertentu, yakni orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan sehingga memudahkan peneliti dalam menjelajahi situasi sosial yang diteliti. Adapun subjek yang dipilih adalah pihak-pihak di SMP Negeri 5 Kota Sorong yang terlibat langsung dalam proses pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) serta memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung terkait pemahaman hak dan kewajiban warga negara. Secara lebih rinci, daftar subjek penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Subjek Penelitian

No	Subjek Penelitian	Jumlah	Alasan Pemilihan Subjek
1	Kepala Sekolah	1 orang	Sebagai penanggung jawab utama kebijakan sekolah, termasuk kebijakan pembelajaran PPKn dan program pembentukan karakter serta kesadaran kewarganegaraan siswa.
2	Wakil Kepala Sekolah	1 orang	Membantu kepala sekolah dalam mengelola dan mengawasi pelaksanaan program sekolah, termasuk bidang kurikulum, kesiswaan, dan pembelajaran PPKn, sehingga mengetahui pelaksanaan kebijakan secara teknis.
3	Guru PPKn	1 orang	Mengajarkan secara langsung materi hak dan kewajiban warga negara kepada siswa, sehingga paling mengetahui tingkat pemahaman dan permasalahan yang dihadapi siswa dalam pembelajaran.
4	Siswa Kelas VII	3 orang	Sebagai subjek utama penelitian yang mengalami langsung proses pembelajaran PPKn dan menjadi objek analisis tingkat pemahaman hak dan kewajiban warga negara.

5	Siswa Kelas VIII	3 orang	Sebagai subjek utama penelitian yang telah mendapatkan materi hak dan kewajiban pada jenjang sebelumnya dan dapat dianalisis perkembangan pemahamannya.
6	Siswa Kelas IX	3 orang	Sebagai subjek utama penelitian yang memiliki pengalaman belajar PPKn paling panjang di jenjang SMP, sehingga dapat memberikan gambaran pemahaman yang lebih komprehensif.

Subjek-subjek tersebut dipilih untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar representatif dan akurat sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu menganalisis pemahaman siswa tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Melalui keberagaman subjek ini, peneliti dapat melakukan teknik triangulasi sumber untuk menjaga validitas dan kredibilitas data, sebagaimana ditegaskan oleh (Moleong 2006) bahwa dalam penelitian kualitatif keabsahan data sangat ditentukan oleh ketepatan pemilihan sumber informasi yang mampu memberikan data secara mendalam dan dapat dipercaya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa teknik yang saling melengkapi, sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi dilakukan secara langsung di lingkungan sekolah untuk mengamati penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan pembelajaran maupun budaya sekolah secara nyata. (Creswell 2014) menegaskan bahwa observasi dalam penelitian kualitatif memungkinkan peneliti memperoleh data kontekstual mengenai perilaku dan interaksi sosial subjek penelitian, sehingga peneliti dapat memahami fenomena yang terjadi secara lebih mendalam dan utuh sebagaimana berlangsung di lapangan. Dalam penelitian ini, observasi difokuskan pada perilaku siswa dalam kegiatan pembelajaran di kelas, pelaksanaan kegiatan pembiasaan

nilai Pancasila di sekolah, serta interaksi sosial siswa dengan sesama teman maupun dengan guru.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan secara mendalam (*in-depth interview*) kepada kepala sekolah, guru, dan siswa untuk memperoleh informasi yang kaya dan terperinci mengenai strategi pembentukan karakter serta upaya pencegahan perilaku menyimpang. (Moleong, 2016) dalam Metodologi Penelitian Kualitatif menjelaskan bahwa wawancara mendalam bertujuan menggali pengalaman, persepsi, dan pemahaman informan terhadap suatu fenomena secara langsung dan terbuka. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara semi-terstruktur menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelumnya, namun tetap memberikan ruang bagi informan untuk mengembangkan jawabannya secara bebas. Seluruh proses wawancara direkam dengan persetujuan informan dan selanjutnya ditranskripsikan untuk keperluan analisis data.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen tertulis maupun arsip yang berkaitan dengan fokus penelitian. Dokumen yang dikaji dalam penelitian ini meliputi tata tertib sekolah, program pendidikan karakter, dokumen kurikulum, serta data pelanggaran siswa. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat dan melengkapi hasil observasi serta wawancara yang telah dilakukan. Melalui analisis dokumen, peneliti dapat memperoleh informasi yang bersifat administratif dan faktual mengenai implementasi nilai Pancasila dalam pembentukan karakter siswa, serta kebijakan sekolah dalam menangani perilaku menyimpang. Dengan demikian, data dokumentasi berperan penting dalam meningkatkan keakuratan dan kredibilitas hasil penelitian secara keseluruhan.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian kualitatif ini adalah peneliti sendiri (human instrument), yang bertugas mengumpulkan data, melakukan observasi, dan melakukan wawancara langsung kepada seluruh subjek penelitian. Guna menjamin keabsahan dan objektivitas data, peneliti didukung oleh instrumen pelengkap sebagai berikut:

1. Pedoman Wawancara (*Interview Guide*)

Instrumen ini berisi garis besar pertanyaan yang diajukan kepada informan, yaitu Kepala Sekolah, Guru PPKn, dan siswa kelas VII, VIII, serta IX. Instrumen ini dirancang untuk menggali data mengenai tingkat pemahaman siswa tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia serta faktor-faktor yang memengaruhi pemahaman tersebut di SMP Negeri 5 Kota Sorong.

2. Pedoman Observasi

Instrumen ini digunakan sebagai panduan bagi peneliti untuk mengamati perilaku keseharian siswa di lingkungan sekolah, proses pembelajaran PPKn di kelas, serta sejauh mana pemahaman tentang hak dan kewajiban warga negara tercermin dalam sikap dan tindakan siswa sehari-hari.

3. Pedoman Dokumentasi

Digunakan untuk mengumpulkan data tertulis seperti dokumen kurikulum PPKn, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), nilai siswa, tata tertib sekolah, serta dokumen lain yang relevan dan mendukung fokus penelitian tentang pemahaman hak dan kewajiban warga negara.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif (Miles, Huberman, and Saldana 2014) dalam *Qualitative Data Analysis* yang terdiri dari:

1. Kondensasi Data (*Data Condensation*): Menyeleksi dan memfokuskan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sesuai dengan fokus penelitian, yaitu pemahaman siswa tentang hak dan kewajiban warga negara serta faktor-faktor yang memengaruhinya.

2. Penyajian Data (*Data Display*): Menyusun data yang telah dikondensasi dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, atau bagan untuk memudahkan pemahaman dan penarikan kesimpulan.
3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*): Menarik makna dari data yang telah dianalisis dan melakukan verifikasi secara berkelanjutan melalui triangulasi sumber dan teknik hingga diperoleh kesimpulan akhir yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

G. Keabsahan Data

Untuk memastikan keabsahan dan kredibilitas data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sebagaimana dikemukakan oleh (Moleong 2006), yang terdiri dari:

1. Triangulasi Sumber: Membandingkan dan mengecek data yang diperoleh dari berbagai sumber, yaitu Kepala Sekolah, Guru PPKn, dan siswa kelas VII, VIII, serta IX untuk memastikan konsistensi informasi.
2. Triangulasi Teknik: Membandingkan data yang diperoleh melalui tiga teknik pengumpulan data yang berbeda, yaitu wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi untuk saling memperkuat kebenaran data.
3. *Member Check*: Mengkonfirmasi kembali hasil temuan dan interpretasi peneliti kepada informan untuk memastikan kesesuaian data dengan maksud informan yang sebenarnya.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Sekolah dan Struktur Organisasi

SMP Negeri 5 Kota Sorong merupakan salah satu institusi pendidikan menengah pertama negeri yang memiliki posisi strategis dalam konstelasi pendidikan di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Sekolah ini secara administratif berada di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sorong. Sebagai lembaga formal, sekolah ini memegang peranan penting dalam membentuk tidak hanya kemampuan akademis (kognitif) siswa, tetapi juga moral, karakter, dan kesadaran mereka sebagai bagian dari warga negara Indonesia di wilayah kepala burung Pulau Papua.

Berdasarkan dokumen resmi satuan pendidikan yang diperoleh peneliti melalui studi dokumentasi, struktur organisasi di SMP Negeri 5 Kota Sorong disusun secara sistematis untuk mendukung seluruh efektivitas layanan pendidikan. Pucuk pimpinan lembaga ini dipegang oleh seorang Kepala Sekolah yang bertanggung jawab penuh atas kebijakan makro, pengelolaan anggaran, dan supervisi akademik. Dalam melaksanakan tugas-tugas keseharian, Kepala Sekolah dibantu secara sinergis oleh Wakil Kepala Sekolah (Wakasek) yang membawahi bidang-bidang fungsional secara spesifik, yang meliputi: Urusan Kurikulum, Urusan Kesiswaan, Urusan Sarana dan Prasarana (Sapras), serta Urusan Hubungan Masyarakat (Humas).

Guna mendukung kelancaran administrasi sekolah, terdapat unit Tata Usaha yang dipimpin oleh Kepala Tata Usaha (KTU) dan didukung oleh staf fungsional yang terbagi ke dalam beberapa bagian pelayanan, yakni Bagian Persuratan, Bagian Perlengkapan, Bagian Kesiswaan, dan Bagian Kepegawaian. Di samping itu, penguatan proses pembelajaran interaktif di sekolah ini ditopang oleh keberadaan sarana laboratorium yang dikelola oleh Kepala Laboratorium IPA

dan Kepala Laboratorium Komputer. Pengelolaan sumber belajar konvensional dan digital diserahkan kepada Kepala Perpustakaan, sementara pemutakhiran data kelembagaan secara nasional dikelola oleh Operator Dapodik sekolah.

Proses pengawasan dan pendampingan siswa secara emosional dan akademik di tingkat kelas dilakukan secara intensif oleh para Wali Kelas. Uniknya, di SMP Negeri 5 Kota Sorong, penamaan rombongan belajar menggunakan nomenklatur lokal dan nasional yang sarat akan nilai sejarah dan budaya. Nama-nama rombongan belajar tersebut antara lain: Wali Kelas Kaisepo, Wali Kelas Marthen Indey, Wali Kelas Silas Papare, Wali Kelas Cendrawasih, Wali Kelas Kasuari, Wali Kelas Kakatua, Wali Kelas Noken, Wali Kelas Honai, dan Wali Kelas Barapen. Adapun materi pembelajaran yang wajib ditempuh oleh seluruh peserta didik di sekolah ini mengacu pada kurikulum nasional, yang meliputi mata pelajaran: Agama Protestan, Agama Islam, Agama Katolik, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), Matematika, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), serta Seni dan Prakarya.

2. Pemahaman Siswa SMP Negeri 5 Kota Sorong terhadap Hak dan Kewajiban sebagai Warga Negara Indonesia

Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang dilakukan terhadap seluruh informan penelitian, yaitu Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Guru PPKn, dan sembilan siswa dari tiga jenjang kelas (VII, VIII, dan IX), diperoleh gambaran yang beragam mengenai tingkat pemahaman siswa terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia.

Guru mata pelajaran PPKn menyampaikan bahwa pemahaman siswa masih berada pada level hafalan tekstual dan mengalami kesulitan ketika diminta menganalisis atau memberikan contoh konkret di luar teks buku pelajaran, sebagaimana disampaikan dalam petikan wawancara berikut:

"Siswa umumnya mudah menghafal definisi hak dan kewajiban secara tekstual dari buku. Namun, mereka mengalami hambatan besar ketika diminta untuk menganalisis fungsi keseimbangan antara keduanya, atau saat diminta memberikan contoh penerapan hak dan kewajiban berskala makro sebagai warga negara Indonesia."

Pada jenjang Kelas VII, terdapat disparitas pemahaman yang mencolok. Informan N.O. tidak mampu menguraikan arti maupun contoh dari hak dan kewajiban karena minimnya stimulasi kognitif dari lingkungan keluarga, sebagaimana diakuinya:

"Di rumah, bapak dan mama tidak pernah cerita atau bicara tentang hak dan kewajiban warga negara."

Sebaliknya, informan P.R. memiliki pemahaman yang lebih matang dan mampu memberikan contoh hak warga negara secara kontekstual, termasuk mengaitkannya dengan program kebijakan pemerintah yang sedang berjalan:

"Contoh hak warga negara itu seperti kebebasan untuk berbicara atau mengeluarkan pendapat di depan umum, dan juga hak untuk mendapatkan Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pemerintah."

P.R. juga mampu menjelaskan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban dengan menyatakan:

"Hak dan kewajiban harus seimbang supaya tidak terjadi keributan di kelas dan di sekolah, dan semuanya bisa berjalan dengan adil."

Informan M.T. dari Kelas VII berada pada tingkat pemahaman moderat; ia memahami hak sebagai kebebasan berekspresi, namun mengalami kesulitan ketika pertanyaan diarahkan di luar teks buku pelajaran.

Pada jenjang Kelas VIII, pola variasi pemahaman serupa masih ditemukan. Informan C.N. mengaku secara terbuka telah melupakan materi yang pernah diajarkan:

"Saya sudah lupa apa itu kewajiban warga negara."

Informan L.S.R. mengalami miskonsepsi mendasar; ketika diminta mendefinisikan hak warga negara, ia menjawab dengan definisi yang sesungguhnya mencerminkan kewajiban moral menghormati milik orang lain:

"Hak warga negara itu artinya kita jangan mengambil barang-barang atau milik orang lain."

Sebaliknya, informan M. dari Kelas VIII menampilkan pemahaman yang paling progresif dengan mendeskripsikan penerapan nyata kewajiban dalam kehidupan sekolah:

"Saya menerapkan kewajiban di sekolah dengan cara ikut serta melaksanakan kegiatan piket kebersihan kelas bersama teman-teman sekelompok dan selalu mengikuti jalannya pelajaran dari guru dengan tertib."

Pada jenjang Kelas IX sebagai tingkat tertinggi, ditemukan pola yang kompleks. Informan D. mampu menganalisis hubungan resiprokal antara hak dan kewajiban secara logis:

"Sebagai warga negara, kita harus terlebih dahulu melakukan apa yang menjadi kewajiban kita. Nah, di saat yang sama, setelah kewajiban itu selesai dijalankan, baru kita memiliki hak untuk menerima apa yang menjadi hak kita dari negara. Jadi keduanya berjalan bersamaan."

Namun, informan A. mengalami tumpang tindih konsep fundamental dengan mengklasifikasikan hak konstitusional memperoleh pendidikan sebagai contoh kewajiban warga negara:

"Contoh kewajiban yang saya tahu itu adalah mendapatkan pendidikan yang layak."

Informan F.P. memiliki pengetahuan substansif mengenai hak-hak dasar seperti jaminan pendidikan dan kesehatan, namun tidak mampu mengklasifikasikannya berdasarkan pasal-pasal UUD NRI 1945. F.P. memberikan saran:

"Saran saya, teman-teman siswa harus memperbanyak waktu untuk belajar materi tentang hak dan kewajiban warga negara supaya tahu aturan."

a. Hasil Penelitian Observasi

Berdasarkan hasil observasi langsung yang dilakukan peneliti di lingkungan SMP Negeri 5 Kota Sorong, ditemukan bahwa perilaku siswa dalam kehidupan sehari-hari di sekolah mencerminkan tingkat pemahaman hak dan kewajiban yang belum merata. Sebagian siswa menunjukkan perilaku yang mencerminkan kesadaran terhadap kewajiban, seperti tertib mengikuti pelajaran, berpartisipasi aktif dalam kegiatan piket kebersihan kelas, dan menghormati guru serta teman sebaya. Namun, di sisi lain, masih ditemukan perilaku yang mencerminkan lemahnya internalisasi kewajiban, seperti keterlambatan masuk kelas, ketidakdisiplinan dalam berpakaian seragam, dan pembuangan sampah sembarangan di lingkungan sekolah.

Dalam kegiatan pembelajaran PPKn di kelas, observasi menunjukkan bahwa sebagian besar siswa bersikap pasif dan hanya menjawab ketika ditunjuk langsung oleh guru. Sangat sedikit siswa yang secara proaktif mengangkat tangan untuk bertanya atau menyampaikan pendapat. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pemahaman siswa tentang hak menyampaikan pendapat sebagai bagian dari hak warga negara belum sepenuhnya diimplementasikan dalam perilaku nyata di kelas. Kegiatan pembelajaran berlangsung dengan bantuan proyektor dan video

pendek, namun keterbatasan perangkat multimedia menjadi hambatan bagi sebagian kelas yang tidak memiliki akses terhadap fasilitas tersebut.

b. Hasil Dokumentasi

Berdasarkan studi dokumentasi yang dilakukan terhadap dokumen resmi satuan pendidikan SMP Negeri 5 Kota Sorong, ditemukan bahwa sekolah memiliki dokumen tata tertib yang memuat ketentuan mengenai hak dan kewajiban siswa, meskipun tidak secara eksplisit menggunakan terminologi tersebut. Dokumen tersebut antara lain mencakup peraturan tata tertib siswa, buku agenda pembelajaran PPKn, serta catatan presensi dan rekap kedisiplinan siswa. Dokumen-dokumen ini menjadi bukti tertulis bahwa sekolah memiliki kerangka regulasi yang mengatur pelaksanaan hak dan kewajiban warga sekolah, sebagaimana dikonfirmasi oleh Kepala Sekolah:

"Sekolah memiliki dokumen resmi yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran. Dokumen tersebut tidak secara khusus merujuk pada hak dan kewajiban, namun di dalamnya memuat ketentuan terkait hak dan kewajiban siswa serta guru. Dokumen ini tertuang dalam dokumen satuan pendidikan sebagai pedoman resmi sekolah."

Selain itu, dokumentasi kegiatan sekolah seperti foto kegiatan program 'Sang Saka' dan simulasi Pemilu OSIS juga diperoleh sebagai bukti kongkret upaya sekolah dalam menginternalisasikan nilai-nilai hak dan kewajiban kewarganegaraan kepada siswa melalui kegiatan di luar kelas. Dokumen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) mata pelajaran PPKn yang dimiliki guru juga menunjukkan bahwa materi hak dan kewajiban warga negara telah terencana secara sistematis sesuai kurikulum yang berlaku.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Siswa tentang Hak dan Kewajiban sebagai Warga Negara Indonesia

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan seluruh informan, teridentifikasi sejumlah faktor yang secara signifikan mempengaruhi tingkat

pemahaman siswa tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia di SMP Negeri 5 Kota Sorong.

Pertama, faktor kualitas pembelajaran PPKn di sekolah. Guru PPKn menjelaskan bahwa metode pembelajaran yang digunakan telah berupaya mengombinasikan ceramah, pendekatan kontekstual, dan diskusi kelompok:

"Dalam menyampaikan materi hak dan kewajiban warga negara, saya mengombinasikan metode ceramah dengan pendekatan kontekstual dan diskusi kelompok. Media yang saya gunakan mencakup penayangan video pendek, proyektor, serta gambar visual yang relevan dengan kasus kehidupan sehari-hari."

Namun, motivasi belajar siswa yang tidak stabil menjadi penghambat efektivitas pembelajaran tersebut:

"Respons siswa bervariasi. Sebagian kecil siswa menunjukkan ketertarikan yang tinggi dan aktif bertanya, namun sebagian besar siswa lainnya cenderung pasif. Motivasi belajar mereka tidak stabil, dan ada kecenderungan kurang percaya diri ketika diminta untuk mengemukakan pendapat mereka sendiri dalam sesi diskusi."

Kedua, faktor program dan kebijakan sekolah. Kepala Sekolah menyampaikan bahwa internalisasi nilai kewarganegaraan dilakukan melalui program unggulan sekolah:

"Integrasi dilakukan melalui seluruh program sekolah. Salah satu contohnya adalah penyambutan siswa setiap pagi oleh guru sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban guru, yang secara tidak langsung menanamkan pemahaman kepada siswa tentang hak dan kewajiban mereka. Selain itu, terdapat program unggulan sekolah seperti 'Sang Saka', yang memberikan ruang bagi siswa untuk memahami hak mereka dalam mengembangkan minat dan bakat melalui berbagai kegiatan dan lomba."

Kepala Sekolah juga menambahkan mengenai simulasi Pemilu OSIS:

"Terdapat pula program khusus yang dilaksanakan setiap awal tahun ajaran baru, sekitar bulan Juli, yaitu pemilihan ketua OSIS yang mekanismenya dirancang menyerupai pemilihan umum (Pemilu). Melalui kegiatan ini, siswa diajak mempraktikkan langsung hak dan kewajiban mereka dalam konteks demokrasi."

Ketiga, faktor lingkungan keluarga. Guru PPKn menegaskan bahwa lingkungan keluarga merupakan faktor paling dominan yang memengaruhi pemahaman siswa:

"Faktor yang paling dominan adalah lingkungan keluarga di rumah dan pengaruh penggunaan gawai (HP). Siswa yang di rumahnya sering mendapatkan bimbingan dari orang tua biasanya lebih cepat menangkap pelajaran. Sebaliknya, penggunaan HP yang tidak terkontrol di luar sekolah sering kali mendegradasi fokus belajar anak."

Keempat, faktor sarana, prasarana, dan kondisi geografis. Kepala Sekolah mengakui adanya keterbatasan infrastruktur yang menjadi hambatan:

"Faktor penghambat utama yang sering dihadapi adalah keterbatasan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran, seperti perangkat multimedia di kelas yang belum sepenuhnya memadai untuk mendukung visualisasi materi secara maksimal."

Wakil Kepala Sekolah juga mengidentifikasi tantangan geografis yang berdampak pada kedisiplinan dan kontinuitas pembelajaran:

"Hambatan terbesar di lapangan adalah kurangnya kesadaran internal dari sebagian siswa untuk menaati aturan secara konsisten. Fenomena keterlambatan siswa di pagi hari masih sering terjadi, yang umumnya dipengaruhi oleh faktor jarak tempat tinggal yang

jauh, kendala transportasi, serta kurangnya pengawasan ketat dari lingkungan keluarga di rumah."

Hasil observasi langsung di lingkungan SMP Negeri 5 Kota Sorong mengonfirmasi sejumlah faktor yang memengaruhi pemahaman siswa tentang hak dan kewajiban warga negara. Dari sisi kualitas pembelajaran, observasi menunjukkan bahwa guru PPKn telah berupaya menggunakan media visual dalam pembelajaran, namun kondisi ruang kelas yang tidak seluruhnya dilengkapi dengan perangkat proyektor yang berfungsi optimal menjadi hambatan nyata di lapangan.

Dari sisi perilaku siswa, observasi mengungkapkan adanya perbedaan yang nyata antara siswa yang tampak memiliki kesadaran kewarganegaraan yang baik dengan siswa yang belum menginternalisasi nilai-nilai tersebut. Siswa yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan kelas dan piket kebersihan mencerminkan pengaruh positif dari bimbingan keluarga. Sebaliknya, siswa yang pasif dan tidak disiplin umumnya berasal dari lingkungan keluarga dengan intensitas bimbingan yang rendah, sebagaimana dikonfirmasi melalui triangulasi data wawancara.

Dari sisi kondisi geografis, observasi lapangan menunjukkan bahwa sekolah menerima siswa dari berbagai wilayah dengan jarak tempuh yang cukup jauh, yang berdampak pada tingkat kehadiran dan kesiapan belajar siswa di kelas. Kondisi ini secara langsung memengaruhi kontinuitas penyampaian materi PPKn, termasuk materi tentang hak dan kewajiban warga negara.

Berdasarkan studi dokumentasi yang dilakukan, ditemukan sejumlah dokumen yang mengkonfirmasi faktor-faktor yang memengaruhi pemahaman siswa. Buku agenda dan jurnal pembelajaran PPKn menunjukkan bahwa materi hak dan kewajiban telah diajarkan secara terstruktur sesuai jadwal, namun rekap presensi siswa menunjukkan adanya ketidakhadiran yang cukup signifikan pada beberapa pertemuan, yang mengindikasikan bahwa materi tidak selalu tersampaikan secara utuh kepada seluruh siswa.

Program sekolah seperti jadwal kegiatan 'Sang Saka' dan berita acara simulasi Pemilu OSIS menjadi bukti konkret upaya institusional sekolah dalam mendukung internalisasi nilai kewarganegaraan melalui pendekatan experiential learning. Namun, catatan keterlambatan dan pelanggaran tata tertib yang ditemukan dalam buku pembinaan kesiswaan menunjukkan bahwa upaya tersebut masih perlu diperkuat, khususnya dalam membentuk kesadaran kewajiban siswa secara konsisten.

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan silabus PPKn juga menjadi bukti bahwa secara formal, materi hak dan kewajiban telah dirancang dengan baik oleh guru. Keterbatasan sarana multimedia yang disebutkan dalam dokumen inventaris sekolah turut memperkuat temuan lapangan mengenai hambatan infrastruktur yang memengaruhi kualitas penyampaian materi.

B. Pembahasan

1. Pemahaman Siswa tentang Hak dan Kewajiban sebagai Warga Negara Indonesia di SMP Negeri 5 Kota Sorong

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan tingkat pemahaman antara siswa yang aktif dalam kegiatan sekolah dengan siswa yang kurang aktif berpartisipasi. Siswa yang aktif dalam organisasi, upacara bendera, maupun kegiatan pembinaan karakter cenderung lebih mampu menjelaskan serta menerapkan konsep hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman belajar yang diperoleh siswa tidak hanya berasal dari kegiatan pembelajaran di dalam kelas, tetapi juga dari pengalaman sosial yang mereka peroleh melalui berbagai aktivitas sekolah.

Temuan tersebut memperkuat pendapat Winataputra (2016) yang menyatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan harus mampu mengembangkan civic knowledge, civic skills, dan civic disposition secara terpadu. Dalam penelitian ini terlihat bahwa siswa yang memperoleh pengalaman langsung melalui kegiatan sekolah memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menghubungkan pengetahuan kewarganegaraan dengan praktik kehidupan sehari-

hari. Dengan demikian, proses pembelajaran yang bersifat partisipatif dan kontekstual terbukti lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara.

Selain itu, masih adanya siswa yang mengalami kesulitan membedakan hak dan kewajiban menunjukkan bahwa pemahaman konsep kewarganegaraan belum sepenuhnya terinternalisasi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pembelajaran yang diberikan belum mampu menjangkau seluruh karakteristik dan kemampuan siswa secara merata. Oleh karena itu, diperlukan strategi pembelajaran yang lebih inovatif dan berpusat pada siswa agar seluruh peserta didik dapat memahami materi secara lebih mendalam dan aplikatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru PPKn telah menggunakan berbagai metode pembelajaran seperti ceramah, diskusi, dan pendekatan kontekstual dalam menyampaikan materi hak dan kewajiban warga negara. Penggunaan metode yang beragam tersebut memberikan dampak positif terhadap pemahaman siswa karena materi yang bersifat abstrak dapat dikaitkan dengan situasi nyata yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Soemantri (2001), Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan membentuk warga negara yang baik melalui pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kewarganegaraan. Berdasarkan teori tersebut, upaya guru dalam menggunakan metode pembelajaran yang variatif merupakan bentuk implementasi Pendidikan Kewarganegaraan yang tidak hanya berorientasi pada penguasaan materi, tetapi juga pada pembentukan sikap dan karakter siswa. Namun demikian, masih ditemukannya siswa yang pasif menunjukkan bahwa efektivitas pembelajaran perlu terus ditingkatkan agar mampu melibatkan seluruh siswa secara aktif dalam proses belajar.

Berdasarkan hasil penelitian, siswa yang memperoleh perhatian dan pendampingan belajar dari orang tua memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara. Sebaliknya, siswa yang

kurang mendapatkan bimbingan dari keluarga cenderung mengalami kesulitan dalam memahami materi yang diajarkan di sekolah.

Temuan ini menunjukkan bahwa keluarga memiliki peran penting sebagai lingkungan pendidikan pertama bagi anak. Menurut Lickona (2013), keluarga merupakan fondasi utama dalam pembentukan karakter anak karena nilai-nilai moral dan tanggung jawab pertama kali dipelajari dalam lingkungan keluarga. Oleh karena itu, hasil penelitian ini memperkuat teori tersebut karena siswa yang mendapatkan pembiasaan disiplin, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap aturan di rumah menunjukkan tingkat pemahaman kewarganegaraan yang lebih baik dibandingkan siswa yang kurang memperoleh pembiasaan tersebut.

Hal ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan kewarganegaraan tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi memerlukan keterlibatan aktif orang tua dalam membimbing dan mengawasi perkembangan anak.

Program-program sekolah sesuai dengan wawancara dengan kepala sekolah seperti upacara bendera, organisasi siswa, program Sang Saka, dan simulasi demokrasi memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar secara langsung mengenai hak dan kewajiban. Melalui kegiatan tersebut siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan secara teoritis, tetapi juga memperoleh pengalaman nyata dalam melaksanakan tanggung jawab, bekerja sama, menghargai pendapat orang lain, serta berpartisipasi dalam kehidupan demokratis.

Kondisi ini menunjukkan bahwa program sekolah memiliki kontribusi yang signifikan dalam membentuk kesadaran kewarganegaraan siswa. Semakin sering siswa terlibat dalam kegiatan yang menuntut tanggung jawab dan partisipasi aktif, maka semakin tinggi pula pemahaman mereka terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara. Temuan ini membuktikan bahwa pendidikan karakter dan pendidikan kewarganegaraan akan lebih efektif apabila dilaksanakan melalui pengalaman langsung daripada hanya melalui pembelajaran teoritis di dalam kelas.

Sesuai dengan hasil wawancara kepala sekolah menunjukkan bahwa keterbatasan sarana dan prasarana masih menjadi salah satu hambatan dalam proses pembelajaran. Keterbatasan media pembelajaran menyebabkan guru tidak selalu dapat menyajikan materi secara menarik dan interaktif. Akibatnya, sebagian siswa kurang termotivasi untuk mengikuti pembelajaran secara aktif.

Menurut Siregar et al. (2026), lingkungan belajar yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai akan meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan hasil belajar peserta didik. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa teori tersebut relevan dengan kondisi di SMP Negeri 5 Kota Sorong. Ketersediaan fasilitas pembelajaran yang memadai dapat membantu siswa memahami materi hak dan kewajiban secara lebih konkret, sedangkan keterbatasan fasilitas berpotensi menghambat proses pemahaman siswa.

Selain itu, kondisi geografis yang menyebabkan sebagian siswa harus menempuh jarak yang cukup jauh menuju sekolah juga berpengaruh terhadap kesiapan belajar mereka. Faktor tersebut secara tidak langsung memengaruhi tingkat pemahaman siswa karena berhubungan dengan kehadiran, konsentrasi belajar, dan keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian dan teori yang digunakan, dapat dipahami bahwa pemahaman siswa tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia merupakan hasil interaksi antara faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terlihat dari kesadaran dan motivasi belajar siswa, sedangkan faktor eksternal meliputi pembelajaran PPKn, lingkungan keluarga, program sekolah, serta sarana dan prasarana pendidikan. Temuan penelitian ini memperkuat teori Fenetiruma (2025), Winataputra (2016), Soemantri (2001), dan Lickona (2013) yang menegaskan bahwa pembentukan warga negara yang baik memerlukan pengembangan pengetahuan, keterampilan, sikap, serta dukungan lingkungan pendidikan yang kondusif. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman siswa mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara harus dilakukan secara terpadu melalui kerja sama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat.

BAB V

2. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai *Analisis Pemahaman Siswa tentang Hak dan Kewajiban sebagai Warga Negara Indonesia di SMP Negeri 5 Kota Sorong*, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman Siswa SMP Negeri 5 Kota Sorong terhadap Hak dan Kewajiban sebagai Warga Negara Indonesia

Pemahaman siswa SMP Negeri 5 Kota Sorong tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia masih berada pada tingkat yang berbeda-beda. Sebagian siswa sudah mampu memahami pengertian hak dan kewajiban serta memberikan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti hak memperoleh pendidikan, hak menyampaikan pendapat, serta kewajiban menaati tata tertib sekolah dan menghormati guru maupun teman. Namun, sebagian siswa lainnya masih memahami konsep tersebut secara teoritis dan tekstual sehingga belum mampu menerapkannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Hasil observasi juga menunjukkan masih adanya perilaku yang mencerminkan lemahnya internalisasi kewajiban, seperti keterlambatan masuk kelas, kurang disiplin dalam berpakaian, kurang aktif dalam pembelajaran, serta kurangnya kesadaran menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemahaman siswa tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia belum sepenuhnya berkembang secara mendalam dan aplikatif.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Siswa tentang Hak dan Kewajiban sebagai Warga Negara Indonesia

Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman siswa tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi motivasi belajar siswa, tingkat kesadaran diri, perkembangan moral, dan keberanian siswa dalam mengemukakan pendapat. Sementara itu, faktor eksternal meliputi kualitas pembelajaran PPKn, metode dan media pembelajaran yang digunakan guru, lingkungan keluarga, program sekolah, sarana dan prasarana pembelajaran, kondisi geografis, serta pengaruh teknologi digital.

Lingkungan keluarga menjadi salah satu faktor yang paling dominan karena siswa yang memperoleh perhatian dan bimbingan dari orang tua cenderung memiliki pemahaman dan perilaku kewarganegaraan yang lebih baik dibandingkan siswa yang kurang mendapatkan pendampingan. Selain itu, keterbatasan fasilitas pembelajaran dan kondisi geografis juga mempengaruhi efektivitas proses pembelajaran PPKn di sekolah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Sekolah

Sekolah diharapkan dapat meningkatkan program pembinaan karakter dan kesadaran kewarganegaraan siswa melalui kegiatan yang lebih kontekstual, disiplin, dan partisipatif agar siswa mampu memahami serta menerapkan hak dan kewajibannya dalam kehidupan sehari-hari.

2. Bagi Guru PPKn

Guru PPKn diharapkan dapat menggunakan metode pembelajaran yang lebih interaktif dan inovatif, seperti diskusi, studi kasus, simulasi demokrasi, dan pembelajaran berbasis pengalaman agar siswa lebih aktif serta mampu memahami materi secara mendalam dan aplikatif.

3. Bagi Orang Tua

Orang tua diharapkan lebih aktif memberikan bimbingan, perhatian, dan pendidikan karakter di rumah agar pemahaman siswa tentang hak dan kewajiban dapat terbentuk secara seimbang antara lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga.

4. Bagi Siswa

Siswa diharapkan dapat meningkatkan kesadaran diri untuk melaksanakan kewajiban sebagai pelajar dan warga negara, seperti disiplin, menghormati hak orang lain, menjaga kebersihan sekolah, dan aktif dalam kegiatan pembelajaran maupun kegiatan sekolah lainnya.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian tentang pemahaman hak dan kewajiban warga negara dengan menggunakan pendekatan yang berbeda atau pada jenjang pendidikan lain sehingga diperoleh hasil penelitian yang lebih luas dan mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, M. Husnu, and M. SH. 2023. *Politik Hukum Dari Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menguji Perpu-Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Arifin, Nur. 2025. "Pendidikan Karakter Di Era Digital." *Penerbit Tahta Media*.
- Arifudin, Opan. 2022. "Perkembangan Peserta Didik (Tinjauan Teori-Teori Dan Praktis)."
- Asshiddiqie, Jimly. 2011. "Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi." *Jakarta: Sinar Grafika* 198–234.
- AYUDHIA, N. U. R. LUTHFIA, PUTRI WAHIDDIYAH NABILA, SAFITRI DESY, and Sujarwo Sujarwo. 2023. "Analisis Problematika Pendidikan Indonesia Di Wilayah 3T." *GURUKU: JURNAL PENDIDIKAN DAN SOSIAL HUMANIORA Учредители: Politeknik Kampar* 1(4):36–46.
- Budiardjo, Miriam. 2003. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia pustaka utama.
- Budimansyah, Dasim. 2008. *PKN Dan Masyarakat Multikultural*. Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan, Sekolah Pascasarjana, Universitas
- Creswell, John W. 2014. *Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. Sage.
- Creswell, John W., and Cheryl N. Poth. 2016. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches*. Sage publications.
- Daryanto, Suryatri Darmiatun. 2013. "Implementasi Pendidikan Karakter Di Sekolah." *Yogyakarta: Gava Media*.
- Dharma, Surya. 2020. "MODEL PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN GLOBAL BERBASIS MULTIKULTURAL." *Universitas Pendidikan Indonesia*.
- Fahmi, Muhammad Rizal, Moh Muchtarom, and Winarno Winarno. 2023. "Analyzing Civics Education Teachers' Difficulties in Applying Merdeka Curriculum at SMPN 9 Kota Bima." *Indonesian Journal of Multidisciplinary*

Science 2(9):3184–94.

Fenetiruma, Rosida Maria. 2025. “Analisis Efektivitas Pendidikan Kewarganegaraan Terhadap Kesadaran Berbangsa Siswa SMPN 2 Teluk Arguni.”

Hakim, Rosniati. 2014. “Pembentukan Karakter Peserta Didik Melalui Pendidikan Berbasis Al-Quran.” *Jurnal Pendidikan Karakter*.

Hasanah, Uswatun. 2016. “Pengembangan Kemampuan Fisik Motorik Melalui Permainan Tradisional Bagi Anak Usia Dini.” *Jurnal Pendidikan Anak* (Website Ini Sudah Bermigrasi Ke Website Yang Baru==> [Https://Journal.Uny.Ac.Id/V3/Jpa](https://Journal.Uny.Ac.Id/V3/Jpa)).

Hastangka, Hastangka, Armaidly Armawi, and Kaelan Kaelan. 2019. “Dampak Sosialisasi Empat Pilar MPR RI Terhadap Pendidikan Pancasila Di Perguruan Tinggi.” *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 16(2):98–110.

Huda, Ni'matul, and M. Sh. 2024. *Politik Hukum Dan Pembangunan Sistem Hukum Nasional*. Sinar Grafika.

Kebudayaan, Riset. 2021. “Kementerian Pendidikan.” *Kebudayaan, Riset Dan Teknologi* 9–46.

Kurniawan, Andri, Ramlan Mahmud, Zahra Rahmatika, and M. U. Muhammadiyah. 2022. “Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan.” *Global Eksekutif Teknologi*.

Lickona, T. 2013. “Educating For Character. Bumi Aksara.”

Lickona, Thomas. 2013. “Character Education: The Cultivation of Virtue.” Pp. 591–612 in *Instructional-design theories and models*. Routledge.

Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, and Johnny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis*. sage.

Moleong, Lexy J. 2006. “A. Metode Penelitian.” *Bandung: PT RemajaRosdakarya*.

- MS, Kaelan. 2001. "Pendidikan Pancasila Paradigma."
- Mulyasa, H. Enco. 2022. *Manajemen Dan Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Bumi aksara.
- Nafiati, Dewi Amaliah. 2021. "Revisi Taksonomi Bloom: Kognitif, Afektif, Dan Psikomotorik." *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21(2):151–72.
- Narwanti, Sri. 2011. "Pendidikan Karakter Pengintergrasian Nilai Pembentukan Karakter." *Jakarta Familia* 14.
- Nasir, Abdul, Nurjana Nurjana, Khaf Shah, Rusdy Abdullah Sirodj, and M. Win Afgani. 2023. "Pendekatan Fenomenologi Dalam Penelitian Kualitatif." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3(5):4445–51.
- PARLINDUNGAN, TUMPAL, and MARULITUA YOSEP. 2024. "ANALISIS YURIDIS DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF KEADILAN RESTORATIF (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Klaten)."
- Purba, Hasnah Nurhayati. 2024. "Implementing Citizenship Education in Elementary School Challenges and Opportunities." *International Journal of Students Education* 231–36.
- Rahman, Ikman Nur, Dasim Budimansyah, Karim Suryadi, and Dadang Sundawa. 2024. "Penguatan Kecerdasan Kewargaan Untuk Mengembangkan Nilai Demokratis Di Perguruan Tinggi." *Jurnal Moral Kemasyarakatan* 9(1):120–29.
- Simamora, Janpatar. 2014. "Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Jurnal Dinamika Hukum* 14(3):547–61.
- Siregar, Suci Rahayu, Indah Firma Sari, Fuji Sukra Aulia, Rahma Fadhillah, Febliyen Rafles Setiawan, and M. Zikrinta Irzis Surbakti. 2026. "URGENSI KETERSEDIAAN SARANA DAN PRASARANA DALAM Mendukung Mutu Pendidikan Sekolah Dasar." *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang* 12(02):175–86.

- Soemantri, M. N. 2001. "Menggagas Pembaharuan Pendidikan PPKn." *Bandung: Remaja Rosdakarya Dan PPS UPI*.
- Sugiyono, Dr. 2013. "Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D."
- Susilawati, Efi, and Gatot S. Widagdo. 2024. "PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN PEMBANGUNAN KARAKTER: MEMBENTUK WARGA NEGARA YANG BERINTEGRITAS." *IBLAM LAW REVIEW* 4(2):191–96.
- Tutik, Titik Triwulan. 2018. "Pembaharuan Hukum Tata Negara Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Cita Negara Hukum Nasional." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 8(2):373–98.
- UUD. 1945. *UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DALAM SATU NASKAH*.
- Winarno, Dwi. 2006. "Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan."
- Winataputra, Udin S. 2016. "Posisi Akademik Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) Dan Muatan/Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (PPKn) Dalam Konteks Sistem Pendidikan Nasional." *Jurnal Moral Kemasyarakatan* 1(1):15–36.
- Winataputra, Udin Saripudin. 2012. "Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Perspektif Pendidikan Untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa (Gagasan, Instrumentasi, Dan Praksis)." *Bandung: Widya Aksara Press Pemerintahan* 1(2):612–25.
- Wita, Gusmira, and Irhas Fansuri Mursal. 2022. "Fenomenologi Dalam Kajian Sosial Sebuah Studi Tentang Konstruksi Makna." *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora* 6(2):325–38.
- Wiyani, Novan Ardy. 2015. "Manajemen PAUD Bermutu: Konsep Dan Praktik MMT Di KB." *TK/RA. Yogyakarta: Gava Media*.
- Yusuf, Syamsu, and Nani M. Sugandhi. 2013. "Perkembangan Peserta Didik."

Zubaedi, M. Ag. 2015. *Desain Pendidikan Karakter*. Prenada Media.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1: LEMBAR OBSERVASI (TERISI)

SMP Negeri 5 Kota Sorong

Diisi berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah, Wakasek, Guru PPKn, dan Siswa

A. Subjek: Kepala Sekolah

1. Kebijakan Pembelajaran PPKn dan Kesadaran Kewarganegaraan

No	Aspek yang Diamati	Ya	Tidak	Keterangan
1	Kepala sekolah menunjukkan dokumen resmi program pembelajaran PPKn atau kebijakan kewarganegaraan	Ya		Tersedia dokumen satuan pendidikan yang memuat ketentuan hak dan kewajiban siswa serta guru sebagai pedoman resmi sekolah.
2	Visi, misi, atau program sekolah memuat nilai-nilai hak dan kewajiban warga negara	Ya		Terdapat program unggulan "Sang Saka" yang memberi ruang siswa mengembangkan minat dan bakat sekaligus memahami hak dan kewajiban.
3	Kepala sekolah menyampaikan arahan terkait kesadaran hak dan kewajiban siswa dalam kegiatan sekolah	Ya		Disampaikan melalui seluruh program sekolah, termasuk penyambutan siswa tiap pagi dan kegiatan pemilihan ketua OSIS yang mensimulasikan mekanisme pemilu.

2. Faktor yang Memengaruhi Pemahaman Siswa

No	Aspek yang Diamati	Ya	Tidak	Keterangan
1	Terdapat program khusus sekolah yang mendukung peningkatan pemahaman	Ya		Program pemilihan ketua OSIS dengan mekanisme menyerupai pemilu dilaksanakan setiap awal

	kewarganegaraan siswa			tahun (Juli).
2	Sarana dan prasarana pembelajaran PPKn tersedia dengan memadai		Tidak	Kepala sekolah menyebutkan keterbatasan sarana dan prasarana sebagai faktor penghambat utama pemahaman siswa.
3	Kepala sekolah melakukan evaluasi terhadap kualitas pembelajaran PPKn secara berkala	Ya		Evaluasi dilakukan; hasilnya menunjukkan siswa berpartisipasi aktif dalam upacara dan minim konflik antar siswa.

B. Subjek: Wakil Kepala Sekolah (Wakasek)

1. Peran Wakasek dalam Pembelajaran PPKn dan Kesadaran Kewarganegaraan

No	Aspek yang Diamati	Ya	Tidak	Keterangan
1	Wakil Kepala Sekolah menunjukkan adanya program atau kebijakan yang mendukung pembelajaran PPKn dan kesadaran kewarganegaraan siswa	Ya		Terdapat program literasi mingguan (15-20 menit) dan kegiatan pagi hari yang menekankan kedisiplinan dan tanggung jawab siswa.
2	Wakil Kepala Sekolah berperan dalam mengintegrasikan nilai-nilai hak dan kewajiban warga negara dalam kegiatan sekolah	Ya		Wakasek memantau kedatangan siswa tiap pagi, menanamkan nilai disiplin, dan memberikan kesempatan yang sama kepada semua siswa untuk berkembang.
3	Wakil Kepala Sekolah menyampaikan arahan atau koordinasi kepada guru terkait penguatan kesadaran	Ya		Koordinasi melalui pembiasaan: siswa diarahkan datang tepat waktu, berpakaian rapi, dan mengikuti aturan sekolah.

	hak dan kewajiban siswa			
--	-------------------------	--	--	--

2. Faktor yang Memengaruhi Pemahaman Siswa

No	Aspek yang Diamati	Ya	Tidak	Keterangan
1	Terdapat program sekolah atau kegiatan (termasuk ekstrakurikuler) yang dikoordinasikan Wakasek untuk mendukung pemahaman kewarganegaraan siswa	Ya		Kegiatan ekstrakurikuler dan lomba; sarana mading; media pembelajaran digital (proyektor) tersedia sebagai pendukung.
2	Wakil Kepala Sekolah terlibat dalam pengawasan pelaksanaan pembelajaran PPKn di sekolah	Ya		Sekolah secara rutin mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran dan kedisiplinan siswa.
3	Wakil Kepala Sekolah melakukan evaluasi atau monitoring terhadap kegiatan yang mendukung kesadaran hak dan kewajiban siswa	Ya		Evaluasi dilakukan; kendala yang masih ada antara lain keterlambatan siswa akibat jarak tempuh jauh dan faktor keluarga.

C. Subjek: Guru PPKn

1. Pelaksanaan Pembelajaran Hak dan Kewajiban Warga Negara

No	Aspek yang Diamati	Ya	Tidak	Keterangan
1	Guru menyampaikan materi hak dan kewajiban warga negara secara jelas dan	Ya		Guru menyiapkan modul ajar/RPP terlebih dahulu, lalu menyesuaikan dengan rencana kegiatan dan

	sistematis			pendekatan yang digunakan.
2	Guru mengaitkan materi hak dan kewajiban dengan kehidupan nyata siswa sehari-hari	Ya		Guru mengaitkan materi dengan konteks keluarga, masyarakat, dan sekolah; contoh: hak mendapat nilai vs kewajiban mengerjakan tugas.
3	Guru menggunakan metode pembelajaran yang aktif, kontekstual, dan partisipatif	Ya		Menggunakan visualisasi (video, gambar, proyektor/IFP), diskusi, debat, dan simulasi proyek pemilihan umum.
4	Guru mendorong siswa untuk berpendapat dan berdiskusi tentang hak dan kewajiban	Ya		Terdapat kegiatan debat kelas membahas isu nyata (pengelolaan sampah, jalan rusak) yang dikaitkan dengan hak dan kewajiban warga negara.

2. Tingkat Pemahaman dan Faktor yang Memengaruhinya

No	Aspek yang Diamati	Ya	Tidak	Keterangan
1	Siswa merespons aktif materi hak dan kewajiban yang disampaikan guru		Tidak	Guru menyebutkan sebagian siswa masih kurang percaya diri dan motivasi tidak stabil; respons belum merata pada semua siswa.
2	Guru memberikan contoh nyata penerapan hak dan kewajiban dalam kehidupan bernegara	Ya		Contoh nyata diberikan dalam diskusi/debat; siswa mengaitkan membayar pajak dengan hak memperoleh fasilitas publik.
3	Guru mengingatkan siswa tentang keseimbangan antara hak dan kewajiban sebagai warga negara	Ya		Pendekatan kontekstual membantu siswa memahami konsep hak dan kewajiban secara lebih sederhana dan nyata.

D. Subjek: Siswa

1. Pemahaman tentang Hak Warga Negara

No	Aspek yang Diamati	Ya	Tidak	Keterangan
1	Siswa mampu menyebutkan jenis-jenis hak warga negara berdasarkan UUD NRI 1945		Tidak	Sebagian besar siswa tidak mampu menyebutkan hak berdasarkan UUD 1945 secara spesifik; hanya menyebut contoh umum seperti pendidikan, kesehatan, dan kebebasan berpendapat.
2	Siswa mampu memberikan contoh hak warga negara dalam kehidupan sehari-hari	Ya		Beberapa siswa mampu memberi contoh: Penina (MBG & kebebasan berpendapat), Muhammad (pendidikan layak), Mei (berpendapat di muka umum).
3	Siswa mampu membedakan hak sebagai siswa dan hak sebagai warga negara		Tidak	Sebagian besar siswa tidak mampu membedakan secara jelas; beberapa mencampuradukkan antara hak siswa dan hak warga negara.
4	Siswa menunjukkan sikap yang mencerminkan penghargaan terhadap hak orang lain	Ya		Ludia menyebutkan memberi contoh baik sebagai kakak kelas; kepala sekolah menilai konflik antar siswa minim.

2. Pemahaman tentang Kewajiban Warga Negara

No	Aspek yang Diamati	Ya	Tidak	Keterangan
1	Siswa mampu menyebutkan jenis-jenis kewajiban warga negara berdasarkan UUD NRI 1945		Tidak	Hanya menyebut kewajiban umum (membayar pajak, mematuhi peraturan); tidak merujuk secara spesifik pada pasal-pasal UUD NRI

				1945.
2	Siswa mampu memberikan contoh kewajiban warga negara dalam kehidupan sehari-hari	Ya		Siswa menyebut contoh: membayar pajak (Mei, Muhammad), mengikuti upacara (Penina), mematuhi peraturan (Apselina, Dika).
3	Siswa mematuhi tata tertib sekolah sebagai wujud pelaksanaan kewajiban	Ya		Penina (taat guru), Muhammad (piket, ikut pelajaran), Ludia (mengikuti peraturan sekolah), Frans (mengikuti pelajaran).
4	Siswa menunjukkan sikap tanggung jawab terhadap kewajiban belajar	Ya		Dika (mengerjakan tugas dengan tanggung jawab), Mei (mengerjakan tugas sekolah), Penina (mengikuti pembelajaran secara tertib).

3. Faktor yang Memengaruhi Pemahaman Siswa

No	Aspek yang Diamati	Ya	Tidak	Keterangan
1	Siswa menunjukkan minat dan motivasi dalam mengikuti pembelajaran PPKn		Tidak	Guru menyebutkan motivasi siswa tidak stabil; beberapa siswa (Nusias, Claudian) hampir tidak menjawab pertanyaan wawancara, menunjukkan minat yang rendah.
2	Siswa aktif bertanya dan berdiskusi tentang materi hak dan kewajiban		Tidak	Hanya sebagian kecil siswa aktif; banyak yang tidak menjawab atau menjawab tidak jelas saat wawancara berlangsung.
3	Siswa mampu mengaitkan materi yang dipelajari dengan pengalaman nyata di lingkungan sekolah	Ya		Muhammad mengaitkan pajak dengan fasilitas publik; Penina dan Mei menyebut contoh kewajiban di sekolah; Dika memahami hak dan kewajiban berjalan bersamaan.

4	Siswa menunjukkan pemahaman yang berkembang sesuai jenjang kelas (VII, VIII, IX)		Tidak	Perkembangan tidak konsisten; siswa kelas IX (Frans, Apselina) masih kesulitan menjelaskan hak/kewajiban berdasarkan UUD 1945, hampir sama dengan kelas VII.
---	--	--	--------------	--

LAMPIRAN II: PEDOMAN WAWANCARA

Subjek: Kepala Sekolah

A. Kebijakan Sekolah dalam Pembelajaran PPKn dan Pembentukan Kesadaran Kewarganegaraan

1. Apakah sekolah memiliki dokumen resmi seperti program pembelajaran atau kebijakan yang mendukung penanaman pemahaman hak dan kewajiban warga negara kepada siswa?

Jawaban:

Sekolah memiliki dokumen resmi yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran. Dokumen tersebut tidak secara khusus merujuk pada hak dan kewajiban, namun di dalamnya memuat ketentuan terkait hak dan kewajiban siswa serta guru. Dokumen ini tertuang dalam dokumen satuan pendidikan sebagai pedoman resmi sekolah.

2. Bagaimana kebijakan sekolah dalam mengintegrasikan materi hak dan kewajiban warga negara ke dalam budaya dan tata kehidupan sekolah sehari-hari?

Jawaban:

Integrasi dilakukan melalui seluruh program sekolah. Salah satu contohnya adalah penyambutan siswa setiap pagi oleh guru sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban guru, yang secara tidak langsung menanamkan pemahaman kepada siswa tentang hak dan kewajiban mereka. Selain itu, terdapat program unggulan sekolah seperti *Sang Saka*, yang memberikan ruang bagi siswa untuk memahami hak mereka dalam mengembangkan minat dan bakat melalui berbagai kegiatan dan lomba. Dalam pelaksanaannya, siswa juga dibiasakan untuk menaati aturan sebagai bagian dari kewajiban mereka. Melalui seluruh program tersebut, sekolah berupaya menanamkan pemahaman tentang hak dan kewajiban baik sebagai siswa maupun sebagai warga negara.

3. Apakah terdapat program khusus yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran siswa tentang hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara?

Jawaban:

Pada awal tahun pembelajaran, biasanya sekitar bulan Juli, sekolah memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara melalui kegiatan pemilihan ketua OSIS. Kegiatan ini diselenggarakan dengan mekanisme yang menyerupai pemilihan umum di Indonesia, sehingga siswa dapat memahami bahwa mereka memiliki hak untuk memilih serta kewajiban untuk menggunakan hak tersebut secara bijaksana.

B. Faktor yang Memengaruhi Pemahaman Siswa

1. Menurut Bapak/Ibu, faktor apa saja yang paling memengaruhi tingkat pemahaman siswa tentang hak dan kewajiban warga negara di sekolah ini?

Jawaban:

Faktor utama yang memengaruhi adalah keterbatasan sarana dan prasarana sekolah. Kondisi ini dapat memengaruhi perilaku siswa dan menghambat optimalisasi pemahaman yang telah diberikan.

Selain itu, perbedaan kemampuan kognitif siswa juga menjadi faktor penting. Tidak semua siswa memiliki tingkat pemahaman yang sama, sehingga sebagian siswa membutuhkan waktu lebih untuk memahami konsep hak dan kewajiban.

2. Bagaimana kondisi sarana, prasarana, dan kualitas pembelajaran PPKn di sekolah ini dalam mendukung pemahaman kewarganegaraan siswa?

Jawaban:

Secara umum, pembelajaran PPKn di sekolah sudah memadai karena didukung oleh tenaga pendidik yang kompeten. Terdapat dua guru PPKn, salah satunya merupakan lulusan Sarjana PPKn, sementara yang lain memiliki kreativitas tinggi, aktif dalam kegiatan profesional seperti program PPG, serta mampu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Hal ini membuat proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan menyenangkan bagi siswa. Selain itu, pihak sekolah terus berupaya meningkatkan sarana pendukung, seperti pengadaan buku di perpustakaan dan perangkat pembelajaran lainnya.

3. Bagaimana evaluasi sekolah terhadap tingkat kesadaran dan pemahaman siswa tentang hak dan kewajiban warga negara selama ini?

Jawaban:

Secara umum, siswa menunjukkan tingkat kesadaran yang baik. Hal ini terlihat dari partisipasi aktif dalam berbagai program sekolah, kedisiplinan dalam mengikuti upacara hari Senin, serta minimnya konflik antar siswa.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa siswa telah memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai hak dan kewajiban mereka, baik sebagai siswa maupun sebagai warga negara.

Subjek: Wakil Kepala Sekolah

A. Peran Wakasek dalam Pembelajaran PPKn dan Pembentukan Kesadaran Kewarganegaraan

1. Bagaimana peran Bapak/Ibu sebagai Wakil Kepala Sekolah dalam mendukung pelaksanaan pembelajaran PPKn di sekolah ini?

Jawaban:

Sebagai Wakil Kepala Sekolah, saya berupaya membangun budaya saling menghormati antara guru dan siswa. Setiap pagi, saya bersama guru melakukan pemantauan terhadap kedatangan siswa, termasuk kerapian, kedisiplinan, serta kondisi umum siswa saat tiba di sekolah.

Selain itu, kami juga menanamkan nilai-nilai budaya sekolah melalui interaksi langsung dengan siswa. Hal ini dilakukan untuk membentuk karakter siswa agar lebih disiplin, tertib, dan menghargai lingkungan sekolah.

2. Bagaimana koordinasi antara Wakasek dengan guru PPKn dalam mengintegrasikan materi hak dan kewajiban warga negara ke dalam kegiatan sekolah sehari-hari?

Jawaban:

Koordinasi dilakukan melalui pembiasaan dalam kegiatan sehari-hari di sekolah. Siswa diarahkan untuk datang tepat waktu, berpakaian rapi, serta mengikuti aturan sekolah sebagai bentuk kewajiban mereka.

Di sisi lain, siswa juga memperoleh haknya, yaitu menerima pembelajaran secara optimal. Guru memiliki kewajiban memberikan pembelajaran yang baik, sedangkan siswa berkewajiban mengikuti proses pembelajaran dengan tertib.

Sekolah juga memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh siswa untuk berkembang, termasuk dalam kegiatan lomba, peringatan hari besar, dan pengembangan bakat. Hal ini bertujuan agar siswa dapat mengekspresikan minat dan bakatnya sekaligus memahami hak dan kewajibannya dalam kehidupan sekolah.

3. Apakah terdapat program atau kegiatan yang dikoordinasikan oleh Wakasek untuk meningkatkan kesadaran siswa tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara?

Jawaban:

Terdapat beberapa program yang mendukung, seperti kegiatan pagi hari yang menekankan kedisiplinan dan tanggung jawab siswa.

Selain itu, terdapat program literasi yang dilaksanakan setiap minggu, di mana siswa diberikan waktu sekitar 15–20 menit untuk membaca atau mendengarkan materi literasi. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran siswa, termasuk dalam memahami hak dan kewajiban mereka.

B. Faktor yang Memengaruhi Pemahaman Siswa

1. Menurut Bapak/Ibu, faktor apa saja yang paling memengaruhi tingkat pemahaman siswa tentang hak dan kewajiban warga negara di sekolah ini?

Jawaban:

Faktor yang memengaruhi terdiri dari faktor internal dan eksternal.

Faktor internal meliputi kondisi siswa, seperti keterlambatan datang ke sekolah, kelelahan akibat jarak tempuh yang jauh, serta kurangnya kesiapan fisik. Sebagian siswa harus berjalan kaki dari tempat tinggal yang cukup jauh sehingga memengaruhi kedisiplinan mereka.

Faktor eksternal berasal dari lingkungan keluarga, terutama peran orang tua dalam membimbing dan mempersiapkan anak sebelum berangkat ke

sekolah. Dukungan orang tua sangat berpengaruh terhadap kesiapan dan kesadaran siswa dalam menjalankan kewajibannya.

2. Bagaimana pelaksanaan program sekolah dan kegiatan ekstrakurikuler dalam mendukung pemahaman kewarganegaraan siswa?

Jawaban:

Secara umum, sekolah telah menyediakan berbagai fasilitas pendukung pembelajaran, termasuk ruang kelas, media pembelajaran digital seperti proyektor, serta perangkat pembelajaran lainnya.

Selain itu, terdapat juga sarana pendukung berbasis budaya seperti mading (majalah dinding) yang digunakan untuk menampilkan informasi dan hasil karya siswa.

Kegiatan ekstrakurikuler dan lomba juga menjadi sarana penting dalam mengembangkan pemahaman kewarganegaraan siswa, karena melalui kegiatan tersebut siswa belajar tentang kerja sama, tanggung jawab, dan partisipasi aktif.

3. Bagaimana bentuk pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran PPKn serta kesadaran siswa selama ini?

Jawaban:

Sekolah secara rutin melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran dan kedisiplinan siswa. Secara umum, guru telah menjalankan kewajibannya dengan baik dalam mengajar.

Namun, masih terdapat kendala pada kedisiplinan siswa, seperti keterlambatan datang ke sekolah. Hal ini sering kali dipengaruhi oleh faktor keluarga dan kurangnya kesiapan siswa di pagi hari.

Meskipun demikian, pihak sekolah terus berupaya melakukan pembinaan dan pengawasan agar siswa semakin sadar akan tanggung jawabnya, baik sebagai peserta didik maupun sebagai warga negara.

Subjek: Guru PPKn

A. Pelaksanaan Pembelajaran Hak dan Kewajiban Warga Negara

1. Bagaimana Bapak menyampaikan materi hak dan kewajiban warga negara kepada siswa di kelas?

Jawaban:

Dalam menyampaikan materi, saya terlebih dahulu menyiapkan perangkat pembelajaran, seperti modul ajar atau RPP yang sesuai dengan materi hak dan kewajiban warga negara. Setelah itu, saya menyesuaikan dengan rencana kegiatan pembelajaran serta pendekatan yang digunakan.

Selanjutnya, saya menyiapkan media pembelajaran yang akan digunakan dalam proses pembelajaran agar materi dapat disampaikan secara efektif kepada siswa.

2. Metode atau pendekatan pembelajaran apa yang digunakan agar siswa tidak sekadar menghafal, tetapi benar-benar memahami konsep hak dan kewajiban secara bermakna?

Jawaban:

Materi PPKn umumnya bersifat konseptual, sehingga saya berupaya agar siswa tidak hanya menghafal. Untuk itu, saya menggunakan pendekatan visualisasi dengan bantuan media seperti video, gambar, serta perangkat teknologi seperti proyektor atau televisi pintar (IFP).

Melalui visualisasi tersebut, siswa diharapkan lebih mudah memahami konsep hak dan kewajiban secara nyata dan kontekstual.

3. Apakah terdapat kegiatan atau program yang mendukung penguatan pemahaman siswa tentang hak dan kewajiban di luar jam pelajaran?

Jawaban:

Ada, salah satunya melalui kegiatan proyek sekolah yang berkaitan dengan simulasi pemilihan umum. Dalam kegiatan tersebut, siswa diperkenalkan pada proses pemilu, seperti kampanye, penyampaian visi dan misi, serta penggunaan surat suara.

Kegiatan ini tidak hanya diajarkan dalam teori, tetapi juga diwujudkan dalam praktik melalui program sekolah, sehingga siswa dapat memahami hak dan kewajiban secara langsung.

B. Tingkat Pemahaman dan Faktor yang Memengaruhinya

1. Bagaimana gambaran umum tingkat pemahaman siswa tentang hak dan kewajiban warga negara berdasarkan pengalaman Anda mengajar?

Jawaban:

Secara umum, tingkat pemahaman siswa tergolong cukup baik, meskipun belum merata pada semua siswa. Dalam pembelajaran, saya mengaitkan materi dengan konteks kehidupan sehari-hari, seperti di lingkungan keluarga, masyarakat, dan terutama di sekolah.

Sebagai contoh, siswa memiliki hak untuk memperoleh pembelajaran dan nilai, namun mereka juga memiliki kewajiban untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Pendekatan kontekstual ini membantu siswa memahami konsep secara lebih sederhana dan nyata.

2. Apakah siswa mampu mengaitkan konsep hak dan kewajiban yang dipelajari di kelas dengan kehidupan nyata mereka sehari-hari? Berikan contohnya.

Jawaban:

Sebagian besar siswa mampu mengaitkan konsep tersebut dengan kehidupan nyata. Hal ini terlihat dalam kegiatan pembelajaran seperti diskusi dan debat di kelas.

Sebagai contoh, dalam kegiatan debat, siswa membahas permasalahan nyata seperti pengelolaan sampah dan kondisi jalan rusak. Dalam diskusi tersebut, siswa mengaitkan kewajiban warga negara seperti membayar pajak dengan hak untuk memperoleh fasilitas publik yang layak.

Melalui kegiatan ini, siswa dapat memahami dinamika antara hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari.

3. Faktor apa saja yang menjadi penghambat pemahaman siswa terhadap materi hak dan kewajiban warga negara?

Jawaban:

Faktor penghambat utama berasal dari internal siswa, seperti kurangnya kesiapan belajar, motivasi yang tidak stabil, serta kondisi emosional atau suasana hati (mood) yang memengaruhi proses belajar.

Selain itu, sebagian siswa masih kurang percaya diri dalam menyampaikan pendapat, sehingga perlu adanya upaya untuk meningkatkan keberanian dan partisipasi mereka dalam pembelajaran.

4. Faktor apa saja yang mendukung atau mempermudah siswa dalam memahami konsep hak dan kewajiban warga negara?

Jawaban:

Faktor pendukung utama adalah ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran, terutama media pembelajaran seperti video, gambar, dan perangkat teknologi.

Dengan adanya media tersebut, siswa lebih mudah memahami materi melalui visualisasi, sehingga konsep hak dan kewajiban dapat dipahami secara lebih jelas dan mendalam.

SOAL WAWANCARA SISWA KELAS VII

KELAS VII

NAMA SISWA : Nusias Okwali

A. Pemahaman Awal tentang Hak Warga Negara

1. **Apa yang Anda ketahui tentang hak sebagai warga negara Indonesia?**

Nusias tidak memberikan jawaban pada pertanyaan ini.

2. **Sebutkan contoh hak yang Anda miliki sebagai siswa dan warga negara Indonesia!**

Nusias tidak memberikan jawaban pada pertanyaan ini.

3. **Apakah Anda merasa hak-hak Anda sebagai siswa sudah terpenuhi di sekolah ini? Jelaskan!**

Nusias tidak memberikan jawaban pada pertanyaan ini.

4. **Dari mana Anda pertama kali mengetahui tentang hak warga negara dari pelajaran PPKn, keluarga, atau sumber lain?**

Nusias tidak memberikan jawaban pada pertanyaan ini.

B. Pemahaman Awal tentang Kewajiban Warga Negara

1. **Apa yang Anda ketahui tentang kewajiban sebagai warga negara Indonesia?**

Nusias tidak memberikan jawaban pada pertanyaan ini.

2. **Sebutkan contoh kewajiban yang harus Anda lakukan sebagai siswa di sekolah!**

Nusias tidak memberikan jawaban pada pertanyaan ini.

3. **Apakah Anda sudah menjalankan kewajiban tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Berikan contohnya!**

Nusias tidak memberikan jawaban pada pertanyaan ini.

4. **Menurut Anda, mengapa hak dan kewajiban harus berjalan secara seimbang?**

Nusias tidak memberikan jawaban pada pertanyaan ini.

C. Faktor yang Memengaruhi Pemahaman

1. **Apakah guru PPKn Anda menjelaskan materi hak dan kewajiban dengan cara yang mudah dipahami? Bagaimana caranya?**

Nusias tidak memberikan jawaban pada pertanyaan ini.

2. Apakah orang tua atau keluarga Anda pernah membahas tentang hak dan kewajiban warga negara di rumah?

Nusias menjawab bahwa orang tua atau keluarganya tidak pernah membahas tentang hak dan kewajiban warga negara di rumah.

3. Apakah ada kesulitan yang Anda rasakan dalam memahami konsep hak dan kewajiban? Apa kesulitannya?

Nusias tidak memberikan jawaban pada pertanyaan ini.

KELAS VII

NAMA SISWA : Penina Rumades

A. Pemahaman Awal tentang Hak Warga Negara

1. Apa yang Anda ketahui tentang hak sebagai warga negara Indonesia?

Penina menjawab bahwa hak adalah sesuatu yang harus diterima oleh setiap warga negara.

2. Sebutkan contoh hak yang Anda miliki sebagai siswa dan warga negara Indonesia!

Penina menjawab bahwa contoh hak yang ia miliki adalah mendapatkan Makan Bergizi Gratis (MBG) dan kebebasan untuk berpendapat.

3. Apakah Anda merasa hak-hak Anda sebagai siswa sudah terpenuhi di sekolah ini? Jelaskan!

Penina menjawab bahwa hak-haknya sebagai siswa sudah terpenuhi di sekolah, namun ia belum dapat menjelaskan lebih lanjut mengenai hal tersebut.

4. Dari mana Anda pertama kali mengetahui tentang hak warga negara dari pelajaran PPKn, keluarga, atau sumber lain?

Penina menjawab bahwa ia pertama kali mengetahui tentang hak warga negara dari pelajaran PPKn di sekolah.

B. Pemahaman Awal tentang Kewajiban Warga Negara

1. Apa yang Anda ketahui tentang kewajiban sebagai warga negara Indonesia?

Penina menjawab bahwa salah satu kewajiban warga negara adalah mengikuti upacara.

2. Sebutkan contoh kewajiban yang harus Anda lakukan sebagai siswa di sekolah!

Penina menjawab bahwa contoh kewajiban sebagai siswa di sekolah adalah mengikuti pembelajaran, mengerjakan tugas, dan datang tepat waktu.

3. Apakah Anda sudah menjalankan kewajiban tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Berikan contohnya!

Penina menjawab bahwa ia sudah menjalankan kewajibannya, yaitu dengan mengikuti pembelajaran dan taat kepada guru.

4. Menurut Anda, mengapa hak dan kewajiban harus berjalan secara seimbang?

Penina menjawab bahwa hak dan kewajiban harus berjalan secara seimbang agar tercipta keadilan.

C. Faktor yang Memengaruhi Pemahaman

1. Apakah guru PPKn Anda menjelaskan materi hak dan kewajiban dengan cara yang mudah dipahami? Bagaimana caranya?

Penina menjawab bahwa guru PPKn-nya sudah menjelaskan materi dengan cara yang mudah dipahami, yaitu dengan memberikan gambaran kehidupan sehari-hari sehingga materi lebih mudah dimengerti.

2. Apakah orang tua atau keluarga Anda pernah membahas tentang hak dan kewajiban warga negara di rumah?

Penina menjawab bahwa orang tua atau keluarganya pernah membahas tentang hak dan kewajiban warga negara di rumah.

3. Apakah ada kesulitan yang Anda rasakan dalam memahami konsep hak dan kewajiban? Apa kesulitannya?

Penina menjawab bahwa ia merasa kesulitan pada bagian unsur-unsur dari hak dan kewajiban warga negara.

KELAS VII

NAMA SISWA : Mei Tukan

A. Pemahaman Awal tentang Hak Warga Negara

1. Apa yang Anda ketahui tentang hak sebagai warga negara Indonesia?

Mei menjawab bahwa hak warga negara Indonesia adalah kebebasan untuk berpendapat di muka umum.

2. Sebutkan contoh hak yang Anda miliki sebagai siswa dan warga negara Indonesia!

Mei tidak memberikan jawaban pada pertanyaan ini.

3. Apakah Anda merasa hak-hak Anda sebagai siswa sudah terpenuhi di sekolah ini? Jelaskan!

Mei menjawab bahwa hak-haknya sebagai siswa sudah terpenuhi di sekolah, namun ia belum dapat menjelaskan lebih lanjut mengenai hal tersebut.

4. Dari mana Anda pertama kali mengetahui tentang hak warga negara dari pelajaran PPKn, keluarga, atau sumber lain?

Mei menjawab bahwa ia pertama kali mengetahui tentang hak warga negara dari pelajaran PPKn di sekolah.

B. Pemahaman Awal tentang Kewajiban Warga Negara

1. Apa yang Anda ketahui tentang kewajiban sebagai warga negara Indonesia?

Mei menjawab bahwa salah satu kewajiban warga negara adalah membayar pajak.

2. Sebutkan contoh kewajiban yang harus Anda lakukan sebagai siswa di sekolah!

Mei menjawab bahwa contoh kewajiban sebagai siswa di sekolah adalah membuang sampah di lingkungan sekolah.

3. Apakah Anda sudah menjalankan kewajiban tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Berikan contohnya!

Mei menjawab bahwa ia sudah menjalankan kewajibannya, yaitu dengan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dari sekolah.

4. Menurut Anda, mengapa hak dan kewajiban harus berjalan secara seimbang?

Mei tidak memberikan jawaban pada pertanyaan ini.

C. Faktor yang Memengaruhi Pemahaman

- 1. Apakah guru PPKn Anda menjelaskan materi hak dan kewajiban dengan cara yang mudah dipahami? Bagaimana caranya?**

Mei menjawab bahwa guru PPKn-nya sudah menjelaskan materi hak dan kewajiban dengan baik.

- 2. Apakah orang tua atau keluarga Anda pernah membahas tentang hak dan kewajiban warga negara di rumah?**

Mei menjawab bahwa orang tua atau keluarganya sudah pernah membahas tentang hak dan kewajiban warga negara di rumah.

- 3. Apakah ada kesulitan yang Anda rasakan dalam memahami konsep hak dan kewajiban? Apa kesulitannya?**

Mei menjawab bahwa ia merasa kesulitan dalam memahami konsep hak dan kewajiban secara lebih mendalam, sehingga ketika ditanya lebih jauh tentang hak dan kewajiban di sekolah, ia kesulitan untuk menjawab.

SOAL WAWANCARA SISWA KELAS VIII

KELAS VIII

NAMA SISWA : Claudian Nistik

A. Perkembangan Pemahaman tentang Hak Warga Negara

- 1. Setelah belajar PPKn selama dua tahun, apa yang Anda pahami tentang hak sebagai warga negara Indonesia?**

Claudian tidak memberikan jawaban pada pertanyaan ini.

2. **Apakah pemahaman Anda tentang hak warga negara bertambah dibandingkan saat kelas VII? Apa yang berubah?**

Claudian menjawab dengan tidak jelas pada pertanyaan ini.

3. **Berikan contoh nyata bagaimana Anda menggunakan hak Anda di lingkungan sekolah maupun masyarakat!**

Claudian tidak memberikan jawaban pada pertanyaan ini.

B. Perkembangan Pemahaman tentang Kewajiban Warga Negara

1. **Apa yang Anda pahami tentang kewajiban sebagai warga negara setelah mengikuti pembelajaran PPKn?**

Claudian menjawab bahwa ia sudah lupa ketika ditanya pada pertanyaan ini.

2. **Apakah Anda sudah menerapkan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari di sekolah? Berikan contohnya!**

Claudian tidak menjawab dengan jelas pada pertanyaan ini.

3. **Menurut Anda, apakah ada perbedaan antara kewajiban sebagai siswa dengan kewajiban sebagai warga negara? Jelaskan!**

Claudian tidak memberikan jawaban pada pertanyaan ini.

C. Faktor yang Memengaruhi Pemahaman

1. **Faktor apa yang paling membantu Anda dalam memahami materi hak dan kewajiban warga negara?**

Claudian menjawab tidak jelas pada pertanyaan ini.

- 2. Apakah cara mengajar guru PPKn berpengaruh terhadap pemahaman Anda? Bagaimana pengaruhnya?**

Claudian menjawab iya namun tidak bisa menjelaskan caranya.

- 3. Selain dari sekolah, dari mana lagi Anda mendapatkan informasi tentang hak dan kewajiban warga negara?**

Claudian menjawab bahwa ia mendapatkan informasi lewat HP/media sosial.

KELAS VIII

NAMA SISWA: Ludia Sirarae Rumades

A. Perkembangan Pemahaman tentang Hak Warga Negara

- 1. Setelah belajar PPKn selama dua tahun, apa yang Anda pahami tentang hak sebagai warga negara Indonesia?**

Ludia menjawab bahwa hak warga negara adalah jangan mengambil milik orang lain.

- 2. Apakah pemahaman Anda tentang hak warga negara bertambah dibandingkan saat kelas VII? Apa yang berubah?**

Ludia menjawab bahwa pemahamannya bertambah.

- 3. Berikan contoh nyata bagaimana Anda menggunakan hak Anda di lingkungan sekolah maupun masyarakat!**

Ludia menjawab bahwa di sekolah ia memberikan contoh yang baik sebagai kakak kelas.

B. Perkembangan Pemahaman tentang Kewajiban Warga Negara

- 1. Apa yang Anda pahami tentang kewajiban sebagai warga negara setelah mengikuti pembelajaran PPKn?**

Ludia diam dan tidak menjawab pada pertanyaan ini.

- 2. Apakah Anda sudah menerapkan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari di sekolah? Berikan contohnya!**

Ludia menjawab bahwa ia mengikuti peraturan sekolah.

- 3. Menurut Anda, apakah ada perbedaan antara kewajiban sebagai siswa dengan kewajiban sebagai warga negara? Jelaskan!**

Ludia menjawab bahwa kewajiban siswa adalah belajar dengan baik.

C. Faktor yang Memengaruhi Pemahaman

- 1. Faktor apa yang paling membantu Anda dalam memahami materi hak dan kewajiban warga negara?**

Ludia menjawab tidak jelas pada pertanyaan ini.

- 2. Apakah cara mengajar guru PPKn berpengaruh terhadap pemahaman Anda? Bagaimana pengaruhnya?**

Ludia menjawab iya namun tidak bisa menjelaskan caranya.

- 3. Selain dari sekolah, dari mana lagi Anda mendapatkan informasi tentang hak dan kewajiban warga negara?**

Ludia menjawab bahwa ia mendapatkan informasi dari sekolah.

KELAS VIII

NAMA SISWA: Muhammad

A. Perkembangan Pemahaman tentang Hak Warga Negara

- 1. Setelah belajar PPKn selama dua tahun, apa yang Anda pahami tentang hak sebagai warga negara Indonesia?**

Muhammad menjawab bahwa hak adalah memberikan masukan pendapat saat bermusyawarah.

- 2. Apakah pemahaman Anda tentang hak warga negara bertambah dibandingkan saat kelas VII? Apa yang berubah?**

Muhammad menjawab bertambah dengan menjelaskan bahwa pemahamannya bertambah sehingga ia bisa membedakan apa itu hak dan apa itu kewajiban.

- 3. Berikan contoh nyata bagaimana Anda menggunakan hak Anda di lingkungan sekolah maupun masyarakat!**

Muhammad menjawab bahwa contoh nyata penggunaan haknya adalah mendapatkan pendidikan yang layak.

B. Perkembangan Pemahaman tentang Kewajiban Warga Negara

- 1. Apa yang Anda pahami tentang kewajiban sebagai warga negara setelah mengikuti pembelajaran PPKn?**

Muhammad menjawab bahwa kewajiban warga negara adalah membayar pajak.

- 2. Apakah Anda sudah menerapkan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari di sekolah? Berikan contohnya!**

Muhammad menjawab sudah, yaitu dengan melakukan piket dan mengikuti pelajaran di sekolah.

3. Menurut Anda, apakah ada perbedaan antara kewajiban sebagai siswa dengan kewajiban sebagai warga negara? Jelaskan!

Muhammad menjawab bahwa kewajiban warga negara adalah tunduk kepada aturan sekolah dan patuh terhadap peraturan negara.

C. Faktor yang Memengaruhi Pemahaman

1. Faktor apa yang paling membantu Anda dalam memahami materi hak dan kewajiban warga negara?

Muhammad menjawab bahwa faktor yang paling membantu adalah dari cara guru mengajar.

2. Apakah cara mengajar guru PPKn berpengaruh terhadap pemahaman Anda? Bagaimana pengaruhnya?

Muhammad menjawab bahwa guru memberikan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari.

3. Selain dari sekolah, dari mana lagi Anda mendapatkan informasi tentang hak dan kewajiban warga negara?

Muhammad menjawab bahwa ia mendapatkan informasi dari HP dan alat teknologi lainnya.

SOAL WAWANCARA SISWA KELAS IX

KELAS IX

NAMA SISWA : Frans Paa

A. Pemahaman Komprehensif tentang Hak Warga Negara

1. **Setelah mengikuti pembelajaran PPKn selama tiga tahun di SMP, apa yang Anda pahami secara mendalam tentang hak warga negara Indonesia?**

Frans menjawab bahwa hak yang ia pahami yaitu mendapatkan pendidikan, mendapatkan perawatan kesehatan, dan mendapatkan kehidupan yang layak.

2. **Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis hak warga negara yang Anda ketahui berdasarkan UUD NRI 1945!**

Frans terlihat bingung ketika ditanya dan tidak dapat menyebutkan jenis-jenis hak warga negara berdasarkan UUD NRI 1945 secara jelas.

3. **Apakah Anda dapat memberikan contoh nyata penerapan hak warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara?**

Frans menjawab tidak jelas dan tidak dapat memberikan contoh nyata penerapan hak warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

B. Pemahaman Komprehensif tentang Kewajiban Warga Negara

1. **Setelah mengikuti pembelajaran PPKn selama tiga tahun di SMP, apa yang Anda pahami secara mendalam tentang kewajiban warga negara Indonesia?**

Frans menjawab tidak jelas mengenai pemahaman tentang kewajiban warga negara Indonesia.

2. **Sebutkan dan jelaskan kewajiban-kewajiban warga negara yang Anda ketahui berdasarkan UUD NRI 1945!**

Frans menjawab bahwa kewajiban warga negara adalah menghormati guru.

- 3. Menurut Anda, bagaimana hubungan antara hak dan kewajiban warga negara? Mengapa keduanya tidak dapat dipisahkan?**

Frans menjawab bahwa hak dan kewajiban saling berkaitan satu sama lain.

- 4. Apakah Anda sudah menjalankan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan nyata? Berikan contoh konkretnya!**

Frans menjawab sudah menjalankan kewajiban yaitu dengan wajib mengikuti pelajaran di sekolah.

C. Faktor yang Memengaruhi Pemahaman

- 1. Selama tiga tahun belajar PPKn di SMP, faktor apa yang paling besar memengaruhi pemahaman Anda tentang hak dan kewajiban warga negara?**

Frans tidak memberikan jawaban pada pertanyaan ini.

- 2. Menurut Anda, apakah pembelajaran PPKn di sekolah ini sudah cukup efektif dalam membangun kesadaran tentang hak dan kewajiban? Mengapa?**

Frans menjawab sudah cukup efektif sehingga dia bisa mengetahui apa itu hak dan apa itu kewajiban, serta pembelajaran sudah memberikan contoh nyata.

- 3. Apa saran Anda agar siswa SMP lebih mudah memahami dan menerapkan hak serta kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari?**

Frans menjawab bahwa siswa harus banyak belajar materi tentang hak dan kewajiban warga negara.

KELAS IX

NAMA SISWA : Dika

A. Pemahaman Komprehensif tentang Hak Warga Negara

- 1. Setelah mengikuti pembelajaran PPKn selama tiga tahun di SMP, apa yang Anda pahami secara mendalam tentang hak warga negara Indonesia?**

Dika menjawab bahwa ia memiliki pemahaman tentang hak dalam UUD namun belum mendalam sehingga ia masih merasa kesulitan dalam memahaminya.

- 2. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis hak warga negara yang Anda ketahui berdasarkan UUD NRI 1945!**

Dika menjawab bahwa jenis hak warga negara yang ia ketahui adalah mendapatkan kehidupan yang layak.

- 3. Apakah Anda dapat memberikan contoh nyata penerapan hak warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara?**

Dika tidak memberikan jawaban terkait contoh nyata penerapan hak warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

B. Pemahaman Komprehensif tentang Kewajiban Warga Negara

- 1. Setelah mengikuti pembelajaran PPKn selama tiga tahun di SMP, apa yang Anda pahami secara mendalam tentang kewajiban warga negara Indonesia?**

Dika menjawab bahwa sebagai warga negara ia harus melakukan kewajiban, dan di saat yang sama ia juga berhak menerima haknya.

2. Sebutkan dan jelaskan kewajiban-kewajiban warga negara yang Anda ketahui berdasarkan UUD NRI 1945!

Dika menjawab bahwa kewajiban warga negara yang ia ketahui adalah membayar pajak dan mematuhi peraturan.

3. Menurut Anda, bagaimana hubungan antara hak dan kewajiban warga negara? Mengapa keduanya tidak dapat dipisahkan?

Dika menjawab bahwa hak dan kewajiban berjalan bersamaan, sehingga apabila seseorang sudah menjalankan kewajibannya maka ia berhak untuk menerima haknya.

4. Apakah Anda sudah menjalankan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan nyata? Berikan contoh konkretnya!

Dika menjawab sudah menjalankan kewajiban yaitu dengan bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah.

C. Faktor yang Memengaruhi Pemahaman

1. Selama tiga tahun belajar PPKn di SMP, faktor apa yang paling besar memengaruhi pemahaman Anda tentang hak dan kewajiban warga negara?

Dika tidak memberikan jawaban pada pertanyaan ini.

2. Menurut Anda, apakah pembelajaran PPKn di sekolah ini sudah cukup efektif dalam membangun kesadaran tentang hak dan kewajiban? Mengapa?

Dika menjawab bahwa pembelajaran PPKn di sekolah sudah cukup efektif atau lumayan dalam membangun kesadaran tentang hak dan kewajiban.

- 3. Apa saran Anda agar siswa SMP lebih mudah memahami dan menerapkan hak serta kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari?**

Dika menjawab bahwa sarannya adalah tetap belajar dan apabila tidak mengetahui sesuatu bisa bertanya kepada guru maupun orang lain.

KELAS IX

NAMA SISWA : Apselina

A. Pemahaman Komprehensif tentang Hak Warga Negara

- 1. Setelah mengikuti pembelajaran PPKn selama tiga tahun di SMP, apa yang Anda pahami secara mendalam tentang hak warga negara Indonesia?**

Apselina menjawab bahwa hak warga negara Indonesia adalah menerima apa yang diberikan oleh negara kepada warganya.

- 2. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis hak warga negara yang Anda ketahui berdasarkan UUD NRI 1945!**

Apselina tidak dapat menjawab dengan jelas mengenai jenis-jenis hak warga negara yang diatur dalam UUD NRI 1945.

- 3. Apakah Anda dapat memberikan contoh nyata penerapan hak warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara?**

Apselina tidak dapat memberikan jawaban yang jelas terkait contoh nyata penerapan hak warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

B. Pemahaman Komprehensif tentang Kewajiban Warga Negara

- 1. Setelah mengikuti pembelajaran PPKn selama tiga tahun di SMP, apa yang Anda pahami secara mendalam tentang kewajiban warga negara Indonesia?**

Apselina menjawab bahwa kewajiban warga negara adalah mendapatkan pendidikan yang layak.

- 2. Sebutkan dan jelaskan kewajiban-kewajiban warga negara yang Anda ketahui berdasarkan UUD NRI 1945!**

Apselina menjawab bahwa kewajiban warga negara yang ia ketahui adalah mematuhi peraturan yang berlaku.

- 3. Menurut Anda, bagaimana hubungan antara hak dan kewajiban warga negara? Mengapa keduanya tidak dapat dipisahkan?**

Apselina menjawab bahwa hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling berkaitan satu sama lain.

- 4. Apakah Anda sudah menjalankan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan nyata? Berikan contoh konkretnya!**

Apselina menjawab bahwa ia sudah menjalankan kewajiban sebagai warga negara, namun tidak dapat memberikan contoh konkret dari kewajiban yang telah ia jalankan tersebut.

C. Faktor yang Memengaruhi Pemahaman

- 1. Selama tiga tahun belajar PPKn di SMP, faktor apa yang paling besar memengaruhi pemahaman Anda tentang hak dan kewajiban warga negara?**

Apselina menjawab bahwa faktor yang paling besar memengaruhi pemahamannya adalah dari kegiatan belajar di sekolah dan juga dari usahanya sendiri dalam mencari tahu tentang hak dan kewajiban warga negara.

2. Menurut Anda, apakah pembelajaran PPKn di sekolah ini sudah cukup efektif dalam membangun kesadaran tentang hak dan kewajiban? Mengapa?

Apselina menjawab bahwa pembelajaran PPKn di sekolah sudah cukup baik dalam membangun kesadaran tentang hak dan kewajiban warga negara.

3. Apa saran Anda agar siswa SMP lebih mudah memahami dan menerapkan hak serta kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari?

Apselina menjawab bahwa sarannya adalah agar siswa fokus belajar supaya bisa mengetahui dan memahami apa itu hak dan apa itu kewajiban sebagai warga negara.

LAMPIRAN III

PROFIL SEKOLAH



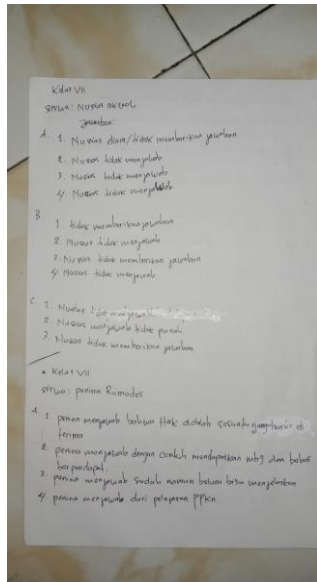
Gambar 1 Dokumentasi SMP Negeri 5 Kota Sorong



Gambar 2 Dokumentasi Struktur Organisasi SMP Negeri 5 Kota Sorong

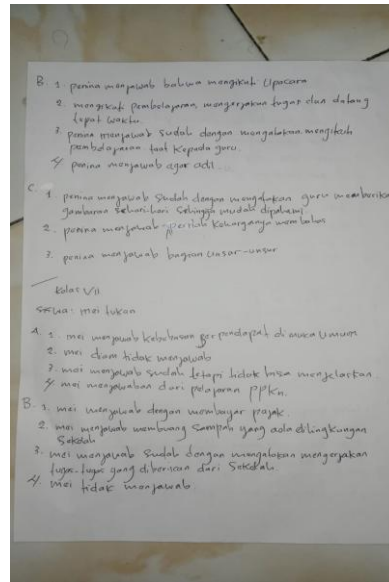
LAMPIRAN IV

DOKUMENTASI HASIL WAWANCARA



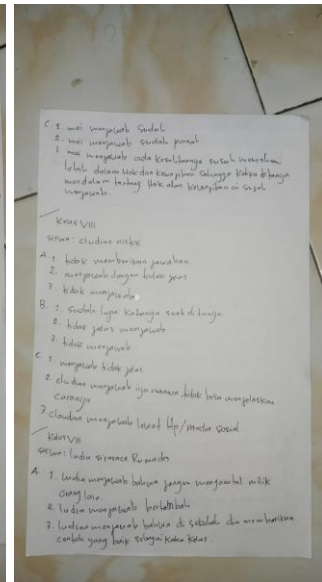
Gambar 1 Hasil

Wawancara Kelas VII



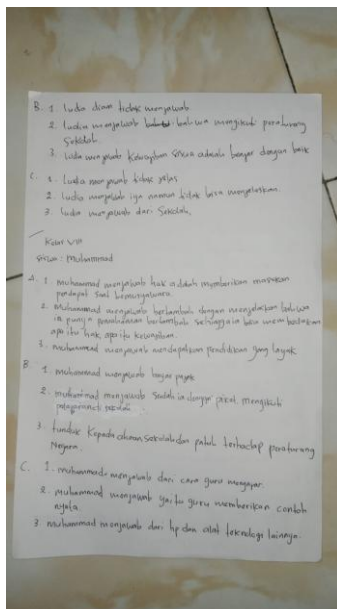
Gambar 2 Hasil

Wawancara Kelas VII



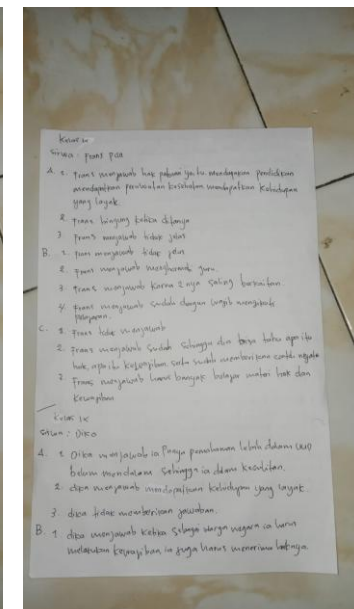
Gambar 3 Hasil

Wawancara Kelas VIII



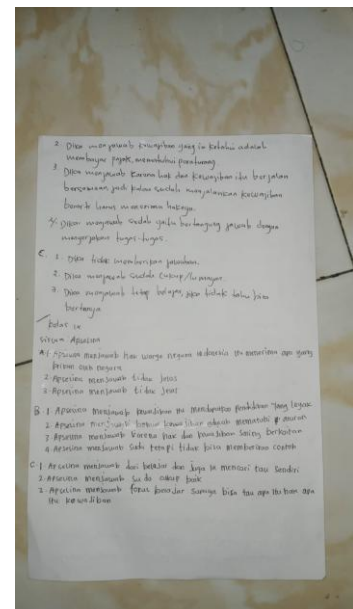
Gambar 4 Hasil

Wawancara Kelas VIII



Gambar 5 Hasil

Wawancara Kelas IX



Gambar 6 Hasil

Wawancara Kelas IX

LAMPIRAN V
DOKUMETASI BERSAMA SUBJEK / INFORMAN PENELITIAN



Dokumentasi Wawancara bersama Kepala Sekolah



**Dokumentasi Wawancara bersama
Wakil Kepala Sekolah**



**Dokumentasi Wawancara bersama
Guru PPKn**

Gambar 1 Dokumentasi Bersama Pihak Sekolah

KELAS VII



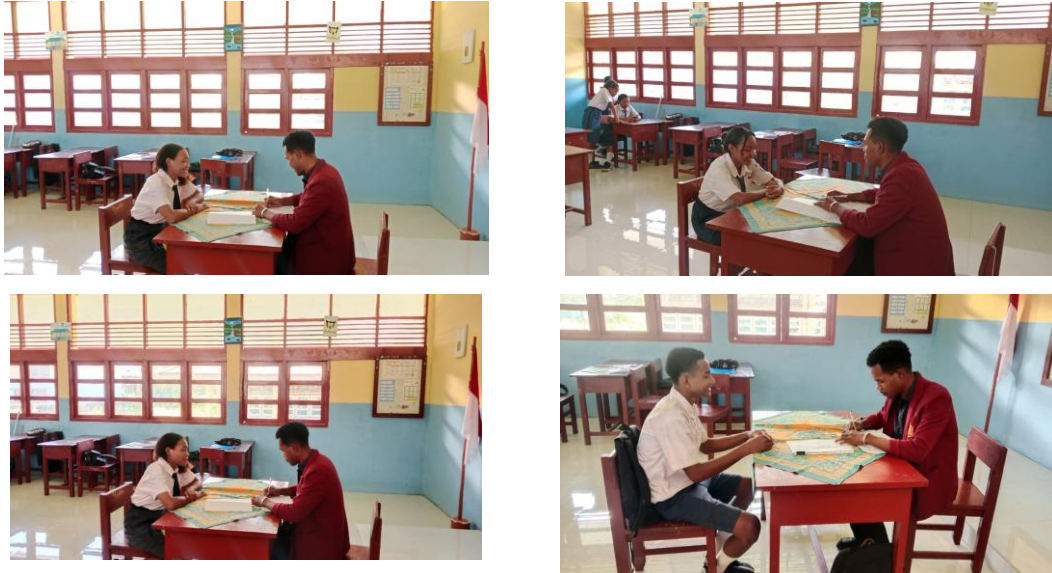
Gambar 2 Wawancara Siswa Kelas VII

KELAS VIII



Gambar 3 Wawancara Siswa Kelas VIII

KELAS IX



Gambar 3 Wawancara Siswa Kelas IX

LAMPIRAN VI
PERMOHONANN IZIN PENELITIAN



Nomor : 106/I.3.AU/SPm/FABIO/B/2026

Sorong, 24 April 2026

Lamp. : -

Perihal : *Permohonan Izin Penelitian*

Kepada Yth.

Kepala SMPN 5 Kota Sorong

Di_

Tempat

Assalamu 'alaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Dekan Fakultas Pendidikan Bahasa, Sosial, dan Olahraga Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu, kiranya dapat menerima dan mengizinkan mahasiswa kami:

Nama	: Musa Rayar
NIM	: 148720522035
Semester	: VIII (Delapan)
Program Studi	: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Judul Penelitian	: "Analisis Pemahaman Siswa tentang Hak dan Kewajiban sebagai Warga Negara Indonesia di SMPN 5 Kota Sorong".

Untuk melaksanakan Penelitian Skripsi di instansi yang Bapak/Ibu pimpin. Pelaksanaan penelitian direncanakan mulai tanggal 27 April s.d 08 Mei 2026.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum warohmatullahi wabarokatuh.


Dekan,
Dr. Roni Andri Pramita, M.Pd.
NIDN. 1411129001

Tembusan disampaikan Kepada:
1. Ketua Program Studi Pendidikan Pkn;
2. Dosen Pembimbing Skripsi;
3. Yang bersangkutan;



Jln. K.H. Ahmad Dahlan No. 1, Mariat Pantai, Aimas, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya.
Email: fabio@unimudasorong.ac.id | Phone: +62 853-7716-0908

LAMPIRAN VII
SURAT KETERAMGAN SELESAI PENELITIAN



PEMERINTAH KOTA SORONG
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 5 KOTA SORONG
(NPSN 60403719 , Terakreditasi : A)
Jl. Kapitan Pattimura, Kelurahan Suprau, Distrik Maladumes Kota Sorong
Email : smp5supraukotasorong@gmail.com Kode Pos : 98411

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
Nomor : 000.425 / 067 / SMPN 5 / 2026

Sehubungan dengan surat permohonan ljin penelitian nomor : 105/A.3 AU/SPm/FABIO/B/2026 Sorong dengan ini menerangkan bahwa

Nama	Musa Rayar
N I M	14872052203
Semester	VIII (Delapan)
Program Studi	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Judul penelitian	Analisis Pemahaman Siswa tentang Hak dan Kewajiban Sebagai Warga Negara Indonesia di SMPN 5 Kota Sorong

Dengan ini kami pimpinan SMPN 5 menyatakan bahwa yang bersangkutan telah melakukan Penelitian dari tanggal 22 April sampai dengan 08 Mei 2026 dengan baik.

Demikian Surat keterangan ini kami buat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Sorong, 8 Mei 2026
Kepala Sekolah,

MELVIN RAHAKBAUW, S.Pd
NIP. 198710112021032001